



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Bogor Nomor 61);
 10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 81);
 11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3



Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);

12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen



- perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
 15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
 16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistematika rencana strategis;
- b. pengendalian dan evaluasi; dan
- c. perubahan rencana strategis.



Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Dinas Pendidikan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Sosial;
- m. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- q. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- t. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- u. Satuan Polisi Pamong Praja;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- x. Dinas Tenaga Kerja;
- y. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- z. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- aa. Dinas Perhubungan;
- bb. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- cc. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- dd. Kecamatan Bogor Tengah;
- ee. Kecamatan Bogor Selatan;
- ff. Kecamatan Bogor Barat;
- gg. Kecamatan Bogor Utara;
- hh. Kecamatan Bogor Timur; dan
- ii. Kecamatan Tanah Sareal.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;



- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pemantauan dan supervisi bagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Sebelum Renstra Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.



- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota terpilih berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 Juni 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 13 Juni 2024

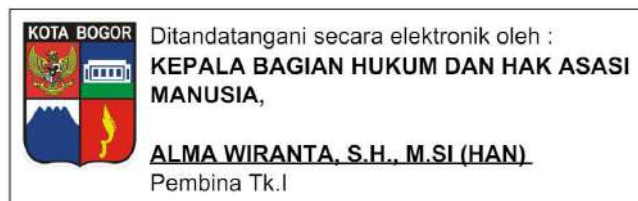
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR**NOMOR : 17 TAHUN 2024****TANGGAL : 13 JUNI 2024****TENTANG : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS****PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025 - 2026****BAB I
PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan di setiap daerah. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Bupati/Walikota yang masa jabatannya Berakhir pada tahun 2023 perlu Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah atau RPD. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026.

RPD Tahun 2025-2026 tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Bogor dan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kota Bogor selama periode Tahun 2025-2026. RPD Tahun 2025-2026 diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, RPD tersebut juga sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026, tetapi juga sebagai penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Kota Bogor Tahun 2025-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang memiliki prioritas pembangunan terkait pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah, dan terakhir pembangunan mengenai kualitas tata kelola pemerintahan. Atas beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Kota Bogor tersebut, maka tema RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah

“PENYIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DAN PELAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS”

Selain menyelaraskan dengan tema yang diungkit dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun 2025-2026 pun selaras dengan tujuan dan sasaran sebagaimana yang tercantum RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang tertuang dalam perwali nomor 6 Tahun 2024. Dinas Pemuda dan Olah Raga menjadi perangkat daerah yang mendukung salah satu tujuan RPD Kota Bogor, yaitu "Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing".

Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan secara lebih teknis dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor.

Tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor berperan memberikan dukungan melalui perumusan kebijakan dan mengkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun 2025-2026 merupakan masa transisi dari RPJMD Kota Bogor yang berakhir di tahun 2024 dan Pemerintahan Kepala Daerah Kota Bogor yang berakhir juga di tahun 2024. Renstra kemudian menjadi acuan dan petunjuk pelaksanaan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor yang merupakan dokumen perencanaan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun untuk periode mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2026, dimana hal tersebut bermanfaat untuk mempercepat pencapaian indikator dan meningkatkan kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 – 2026 ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 12); dan

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kepemudaan ((Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 12 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 131 Tahun 2022, tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor;
26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 117 Tahun 2021 tentang Organisasi Kepemudaan.
27. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga 2025-2026 adalah untuk penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu dua tahun mengacu kepada RPD Kota Bogor Tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2025-2026 dalam menunjang tujuan dan sasaran Kota Bogor yang tertuang dalm Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026;
2. Memberikan pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2025 – 2026);

3. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LKIP, LPPD, dan LKPJ tahunan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun 2025 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Terhadap Renstra Provinsi Jawa Barat
- 3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Stuktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan urusan Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka telah dilakukan perubahan dan penyesuaian atas uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 131 Tahun 2022, tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor.

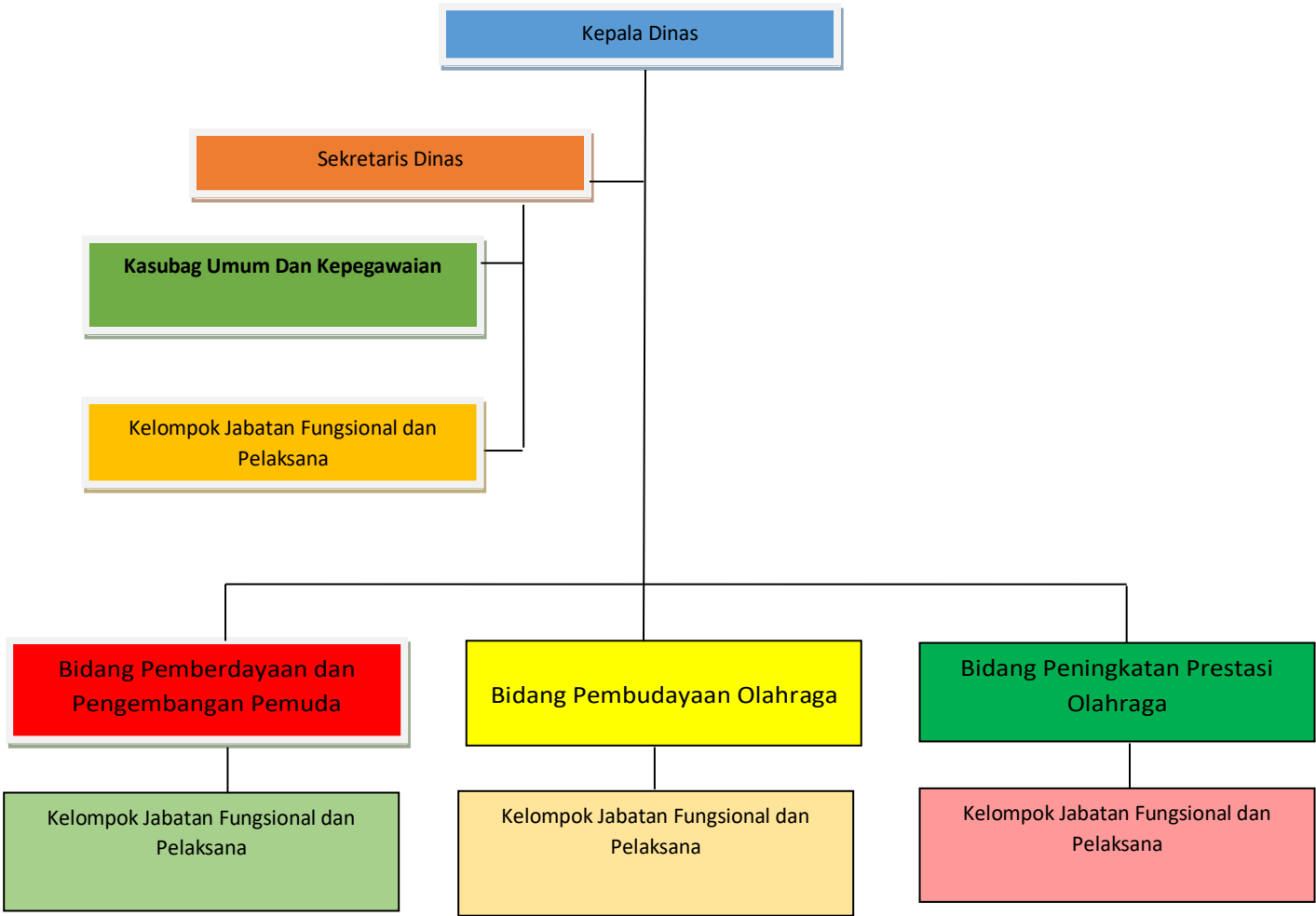
Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor terdiri atas :

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. Bidang Pembudayaan Olah Raga membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor digambarkan sebagaimana gambar 2.1:

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor



2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor

Sesuai amanat :

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 131 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119);

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olah raga;
- d. Pelaksanaan administrasi d di bidang pemuda dan olah raga; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai di bidang pemuda dan olah raga.

Uraian Tugas Dinas Kepala Dinas yaitu :

- a. Tugas Manajerial:
 1. Memimpin pelaksanaan tugas Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan Olah Raga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 2. Mendistribusikan pekerjaan mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. Memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 6. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b. Tugas Teknis:

1. Merumuskan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pemuda dan olah raga;
2. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga;
4. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dalam pelaksanaan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, bidang pembudayaan olah raga, dan bidang peningkatan prestasi olah raga;
5. Melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga yang berkaitan dengan bidang pemuda dan olah raga seizin wali kota;
6. Melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran meliputi:
 - a) Menyusun rka-skpd dinas;
 - b) Menyusun dpa-skpd dinas;
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d) Melaksanakan anggaran dinas;
 - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f) Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h) Menandatangani surat perintah membayar;
 - i) Mengelola utang dan piutang daerah kota yang menjadi tanggung jawab dinas;
 - j) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dinas;
 - k) Mengawasi pelaksanaan anggaran dinas;
 - l) Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah;
 - m) Menetapkan pejabat lainnya lingkup dinas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah kota;
 - n) Menyusun anggaran kas satuan kerja perangkat daerah;
 - o) Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - p) Menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
 - q) Menyusun dokumen pemberian hibah bantuan sosial;
 - r) Menyusun dokumen permintaan, pengesahan, pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, bendahara umum daerah melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut; dan

- s) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
7. Melaksanakan tugas selaku pengguna barang meliputi:
- a) Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah lingkup dinas;
 - b) Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d) Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f) Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g) Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada wali kota melalui pengelola barang;
 - h) Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j) Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;
8. Melaksanakan monitoring penerapan SP, menetapkan dokumen SOP, dan penyusunan SKM pada dinas;
9. Menetapkan perjanjian kinerja lingkup dinas; dan
10. Merumuskan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan laporan lainnya lingkup dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;
- c. Pelaksanaan tugas administrasi Barang Milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Dinas.

Uraian Tugas Sekretaris yaitu:

- a. Tugas Manajerial :
 1. Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 2. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan serta mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas;
 4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 5. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat; dan
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;
- b. Tugas Teknis :
 1. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana anggaran, penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan Dinas dan Sekretariat;
 2. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset lingkup Dinas, dan kerumahtanggaan;
 3. Mengoordinasikan penghimpunan data, informasi, dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
 4. Mengoordinasikan penyusunan naskah rancangan produk hukum daerah di bidang Pemuda dan Olahraga;
 5. Melaksanakan fasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat dan melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;

6. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi:
 - a) Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b) Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
 - c) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d) Melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e) Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang meliputi:
 - a) Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - b) Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c) Meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
 - d) Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e) Mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f) Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - g) Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
 - h) Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;
 - i) Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
 - j) Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan
 - k) Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna;

8. Mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, gaji, dan tunjangan penghasilan pegawai;
9. Mengoordinasikan penyusunan pelaporan keuangan dan dana yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan bantuan lainnya, laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca dinas, dan insidentil serta melaksanakan analisis prognosis realisasi anggaran;
10. Mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu lingkup Dinas;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan tanggapan pemeriksaan;
12. Mengoordinasikan penyusunan SOP, SP, SKM, dan perjanjian kinerja lingkup Dinas;
13. Mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Dinas; dan
14. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan laporan lainnya lingkup Dinas.

Sekretaris membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu:

- a. Tugas Manajerial :
 1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas bawahan;
 3. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 5. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

b. Tugas Teknis :

1. Menyusun konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, Barang Milik Daerah, dan kerumahtanggaan lingkup Dinas;
4. Melaksanakan penatausahaan barang pengguna meliputi:
 - a) Menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah lingkup Dinas;
 - b) Membuat usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c) Mengoordinir pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
 - d) Membuat konsep pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e) Membuat rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f) Membuat usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - g) Mengoordinasikan penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;

- h) Meneliti Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 - i) Mengoordinasikan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
 - j) Membuat laporan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan k) Menverifikasi laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna.
5. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan aset Dinas;
 6. Menyusun usulan peningkatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan latihan (diklat), atau pelatihan teknis, magang, tugas belajar, izin belajar, dan lainnya lingkup Dinas;
 7. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan Sumber Daya Manusia meliputi validasi data pegawai, pengurusan administrasi kepegawaian meliputi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, usulan pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami, Kartu Pegawai, kartu kepesertaan Badan Pengelola Jaminan Pegawai, dan pengelolaan SIMPEG, serta administrasi kepegawaian lainnya;
 8. Mengelola penyediaan informasi kepada masyarakat dan menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat;
 9. Melaksanakan koordinasi pembinaan kepegawaian lingkup Dinas;
 10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
 11. Menghimpun Sasaran Kerja Pegawai lingkup Dinas;
 12. Menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 13. Menyusun perjanjian kinerja dan konsep SOP lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 14. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- b. Penyusunan rencana kerja di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- d. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda yaitu:

- a. Tugas Manajerial :
 1. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda yang meliputi Kelompok Substansi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda, Kelompok Substansi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda, serta Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 2. Mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 6. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b. Tugas Teknis :

1. Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
2. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta perjanjian kinerja lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
3. Mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
4. Mengoordinasikan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan dan kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, peningkatan wawasan dan kreatifitas pemuda, serta sarana dan prasarana kepemudaan;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kota;
7. Mengoordinasikan kegiatan pelayanan kepemudaan yang bertujuan untuk penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda; yang dilaksanakan dalam bentuk bela negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja, serta pemberian kesempatan untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi;
8. Mengoordinasikan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana kepemudaan;
9. Mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemuda, dan pemuda kader;
10. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesukarelawanan pemuda melalui pendampingan, pembimbingan, pembinaan, dan pelatihan.
11. Mengoordinasikan pengembangan kepemimpinan pemuda melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan/atau forum kepemimpinan pemuda sesuai dengan minta, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah;
12. Mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan pemuda meliputi kegiatan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, promosi dan/atau bantuan akses modal melalui kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan dengan dunia usaha;

13. Mengoordinasikan pengembangan kepeloporan pemuda untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi melalui kegiatan, pendampingan dan/atau forum kepeloporan pemuda sesuai karakter daerah
14. Mengoordinasikan penyelenggaraan kemitraan secara sinergis antara organisasi kepemudaan dengan organisasi kepemudaan negara lain;
15. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan melalui perlindungan pemuda, advokasi/pendampingan, akses pengembangan diri, penggunaan sarana dan prasarana tanpa diskriminatif.;
16. Mengoordinasikan peran aktif pemuda dalam menumbuhkembangkan aspek etika, moralitas, iman, ketaqwaan, ketahanan mental spiritual, dan/atau kesadaran hukum;
17. Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan kepemudaan kepramukaan dan standardisasi organisasi kepemudaan dalam bentuk sosialisasi, invitasi, pameran, saresehan, pagelaran, gebyar pemuda, jambore, dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, dan pelestarian lingkungan hidup;
18. Mengoordinasikan kegiatan yang bertujuan membina pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan daerah dan nasional, memberdayakan pemuda melalui kegiatan yang memberikan perlindungan dari pengaruh destruktif, membuka akses untuk pengembangan diri, advokasi, pelayanan yang tidak diskriminatif, serta melibatkan pemuda, dan memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi;
19. Mengoordinasikan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera;
20. Mengoordinasikan pendataan dan pembaharuan data organisasi kepemudaan dan kepramukaan berbasis elektronik;
21. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan yang bergerak dalam ruang lingkup kepelajaran di jenjang menengah dan kemahasiswaan;
22. Mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi, monitoring, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan hibah bantuan sosial; dan
23. mengoordinasikan perencanaan, pendataan pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan sarana dan prasarana kepemudaan.

Bidang Pembudayaan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pembudayaan Olah Raga. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembudayaan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pembudayaan Olah Raga;
- b. Penyusunan rencana kerja di Bidang Pembudayaan Olah Raga;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembudayaan Olah Raga;
- d. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pembudayaan Olah Raga;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pembudayaan Olah Raga;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pembudayaan Olah Raga; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Bidang Pembudayaan Olah Raga yaitu:

- a. Tugas Manajerial:
 1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembudayaan Olah Raga yang meliputi Kelompok Substansi Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olahraga, Kelompok Substansi Olah Raga Rekreasi, Masyarakat dan Layanan Khusus, serta Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Pembudayaan Olah Raga;
 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pembudayaan Olah Raga; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- b. Tugas Teknis:
 1. Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Pembudayaan Olah Raga;
 2. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta perjanjian kinerja lingkup Bidang Pembudayaan Olah Raga;

3. Mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Bidang Pembudayaan Olah Raga;
4. Mengoordinasikan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Pembudayaan Olah Raga;
5. Mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olahraga, Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus, serta Sarana dan Prasarana Olah Raga;
7. Menyusun standar dan kriteria pengelolaan Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olahraga, Seksi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus, serta Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
8. Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi masyarakat, pengelolaan pembinaan sentra olah raga dan sekolah khusus olah raga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta sarana dan prasarana olah raga;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olah raga;
10. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, dan analisis, di bidang pembudayaan olah raga;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan olahraga pendidikan yang terkait dengan pembinaan dan kompetisi pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
12. Mengoordinasikan fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dalam dan luar negeri;
13. Mengoordinasikan pengembangan olah raga rekreasi masyarakat dan layanan khusus serta penyelenggaraan olah raga massal dan kesehatan olah raga;
14. Mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan olah raga petualangan, olah raga tantangan, olah raga wisata, dan pengembangan ruang publik olah raga;
15. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, bimbingan teknis, pengembangan, pembinaan, kompetisi dan monitoring serta evaluasi pelaporan kegiatan olahraga tradisional, olah raga usia dini, olahraga usia lanjut dan olah raga khusus;
16. Mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi, monitoring, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan hibah bantuan sosial; dan

17. Mengoordinasikan perencanaan, pendataan pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan sarana dan prasarana olahraga.

Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
- b. Penyusunan rencana kerja di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
- d. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga yaitu:

- a. Tugas Manajerial:
 1. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Dasar yang meliputi Kelompok Substansi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan, Kelompok Substansi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olahraga Prestasi, dan Kelompok Substansi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
 2. Mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 6. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
 8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b. Tugas Teknis:

1. Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
2. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta perjanjian kinerja lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
3. Mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
4. Mengoordinasikan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
5. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di Kelompok Substansi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan, Kelompok Substansi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olahraga Prestasi, dan Kelompok Substansi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
6. Memantau, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan di Kelompok Substansi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan, Kelompok Substansi Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olahraga Prestasi dan Kelompok Substansi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
7. Mengoordinasikan bimbingan teknis, supervisi, pemanduan bakat/seleksi dan kompetisi atlit usia muda, peningkatan mutu pelatih, peningkatan mutu instruktur, peningkatan mutu tenaga pendukung, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
8. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kejuaraan dan pekan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional, dan promosi olahraga, serta penyelenggaraan penghargaan olah raga bagi atlit berprestasi;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria olahraga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional dan promosi olahraga, serta organisasi keolahragaan;
10. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan bimbingan teknis olahraga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional, dan promosi olahraga;
11. Mengoordinasikan pengembangan organisasi keolahragaan melalui pemberian hibah dan bantuan sosial dengan melaksanakan verifikasi, monitoring, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan; dan

12. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, evaluasi, pelaporan, peningkatan organisasi keolahragaan, dan kerja sama organisasi keolahragaan Daerah Kota dengan lembaga terkait serta pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kebutuhan Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas. Rencana kebutuhan Jabatan Fungsional meliputi jumlah, jenis, dan jenjangnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Uraian Tugas dan Penetapan Sub Koordinator Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

1. Sub Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Sub Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan.
3. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
4. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional maka pejabat fungsional dengan jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
5. Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

6. Pejabat fungsional yang diangkat dari hasil penyetaraan jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, pada saat akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor adalah kekuatan personil berdasarkan jabatan, golongan, jenis kelamin, usia dan pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Kekuatan personil berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Formasi	Terisi
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	4	3
3.	Eselon IV	1	1
4.	Jabatan Fungsional	11	8
Jumlah		17	13

(Sumber: Data Dispora Tahun 2023)

Tabel 2.2.2

Kekuatan personil berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1	-	1
2.	Golongan IV/b	-	-	-
3.	Golongan IV/a	3	2	5
4.	Golongan III/d	5	3	8
5.	Golongan III/c	5	-	5
6.	Golongan III/b	-	5	5
7.	Golongan III/a	6	2	8
8.	Golongan II/d	10	1	11
9.	Golongan II/c	1	-	1
10.	Golongan II/b	1	-	1
Jumlah		32	13	45

(Sumber: Data Dispora Tahun 2023)

Tabel 2.2.3.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Magister S-2	7
2.	Sarjana S-1	21
3.	Sarjana Terapan/DIV	0
4.	Sarjana Muda / DIII	1
5.	SLTA	15
6.	SLTP	1
Jumlah		45

(Sumber: Data Dispora Tahun 2023)

Tabel 2.4
Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM saat ini (s.d semester 1 Tahun 2022)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	1	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	1	-	-	-	-	1	-
2.1	Sub.Koordinasi Bagian Perencanaan Dan Pelaporan	1	-	-	-	-	1	-
2.1.1	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	-	-	-	-	1	-
2.1.2	Pengelola Bahan Perencanaan		-	-	1	-	1	-
2.2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	1	-
2.2.1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	-	1	-	1	-
2.2.2	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2	-	-	-	-	2	-
2.2.3	Pengadministrasi Umum	1	-	-	-	-	1	-
2.3	Sub.Koordinasi Bagian Keuangan	1	-	-	-	-	1	-
2.3.1	Pengelola Keuangan	2	-	-	-	-	2	-
2.3.2	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	-	-	-	-	1	-
2.3.3	Bendahara	1	-	-	-	-	1	-
3	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	1	-	-	-	-	1	-
3.1	Sub.Koordinasi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda	1	-	-	-	-	1	-
3.1.1	Penyuluh Kepemudaan	2	-	-	-	-	2	-
3.1.2	Pengelola Data	1	-	-	-	-	1	-

3.2	Sub.Koordinasi organisasi kepemudaan, kepramukaan, peningkatan, wawasan dan kreativitas pemuda	1			-		1	
3.2.1	Penyuluh Kepemudaan	1	-	-	-	-	1	-
3.2.2	Pengelola Data	2	-	-	-	-	2	-
3.3	Sub.Koordinasi Sarana prasarana kepemudaan	1			-		1	
3.3.1	Pengembang Sarpras	1	-	-	-	-	1	-
3.3.2	Pengadministrasi Sarpras	1	-	-	-	-	1	-
4	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	1	-	-	-	-	1	-
4.1	Sub.Koordinasi Olahraga Pendidikan, Sentra Olahraga dan Kemitraan Olahraga	1			-		1	
4.1.1	Penyuluh Olahraga	-	-	-	1	-	1	-
4.1.2	Pengelola Data	1	-	-	-	-	1	-
4.2	Sub.Koordinasi Olahraga Rekreasi, Masyarakat Dan Layanan Khusus	1			-		1	
4.2.1	Penyuluh Olahraga	1	-	-	-	-	1	-
4.2.2	Pengelola Data	2	-	-	-	-	2	-
4.3	Sub.Koordinasi infrastruktur keolahragaan	1			-		1	
4.3.1	Pengembang Sarpras	-	-	-	3	-	3	-
4.3.2	Pengadministrasi Sarpras	1	-	-	1	-	2	-
4.3.3	Pengelola Penataan Sarpras	11	-	-	6	-	17	-
5	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1	-	-	-	-	1	-
5.1	Sub.Koordinasi pembibitan,Iptek dan tenaga Keolahragaan	1			-		1	
5.1.1	Penyuluh Olahraga	1			1		2	
5.1.2	Pengelola Data	-			1		1	
5.2	Sub.Koordinasi Promosi olahraga,penghargaan dan olahraga prestasi	1			1		1	
5.2.1	Analisis Keolahragaan	1	-	-	-	-	1	-
5.2.2	Pelatih Atlet	-	-	-	3	-	3	-
5.3	Sub.Koordinasi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi	1			-		1	

	Keolahragaan							
5.3.1	Analisis Keolahragaan	-	-	-	1	-	1	
5.3.2	Pengelola Data	-	-	-	1	-	1	

Tabel 2.5.
Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 2 Tahun 2023)			Rencana Jumlah SDM yang Diusulkan mengikuti Diklat (s.d 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional Umum	Struktural	Teknis Lainnya
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	1	-	-	1	-
3	Sub.Koordinasi Bagian Perencanaan Dan Pelaporan	1	-	-	1	1	-
3.1	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	-	-	1	-	-	-
3.2	Pengelola Bahan Perencanaan	-	-	-	1	-	-
4	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	-	1	-	-	1	-
4.1	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	-	-	2	-	-

4.2	Pengadministrasi Umum	-	-	-	1	-	-
4.3	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	-	1	-	-
4.4	Pengelola Kepegawaian	-	-	1	1	-	-
4.5	Pramu Kebersihan	-	-	-	-	-	-
5	Sub.Koordinasi Bagian Keuangan	1	-	-	-	1	-
5.1	Pengelola Keuangan	-	-	-	2	-	-
5.2	Verifikator Data Laporan Keuangan	-	-	-	1	-	-
5.3	Bendahara	-	-	1	1	-	-

6	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	-	1	-	-	-	-
7	Sub.Koordinasi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda	1	-	-	-	1	-
7.1	Penyuluh Kepemudaan	-	-	-	1	-	-
7.2	Pengelola Data	-	-	-	1	-	-
8	Sub.Koordinasi organisasi kepemudaan, kepramukaan, peningkatan, wawasan dan kreativitas pemuda	-	1	-	-	1	-

8.1	Penyuluh Kepemudaan	-	-	-	-	-	-
8.2	Pengelola Data	-	-	-	1	-	-
9	Sub.Koordinasi Sarana prasarana kepemudaan	-	1	-	-	1	-
9.1	Pengembang Sarpras	-	-	-	1	-	-
9.2	Pengadministrasi Sarpras	-	-	-	1	-	-
10	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	-	1	-	-	-	-
11	Sub.Koordinasi Olahraga Pendidikan, Sentra Olahraga dan Kemitraan Olahraga	-	-	-	-	1	-
11.1	Penyuluh Olahraga	-	-	-	1	-	-
11.2	Pengelola Data	-	-	-	1	-	-
12	Sub.Koordinasi Olahraga Rekreasi, Masyarakat Dan Layanan Khusus		-			1	-
12.1	Penyuluh Olahraga	-	-	-	1	-	-
12.2	Pengelola Data	-	-	-	1	-	-
13	Sub.Koordinasi infrastruktur keolahragaan	-	-	-	-	1	-

13.1	Pengembang Sarpras	-	-	-	-	-	-
13.2	Pengadministrasi Sarpras	-	-	-	11	-	-
13.3	Pengelola Penataan Sarpras	-	-	-	1	-	-

14	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	-	1	-	-	1	-
15	Sub.Koordinasi pembibitan,Iptek dan tenaga Keolahragaan	1	-	-	-	1	-
15.1	Penyuluh Olahraga	-	-	-	1	-	-
15.2	Pengelola Data		-		-	-	-
16	Sub.Koordinasi Promosi olahraga,penghargaan dan olahraga prestasi	1	-	-	-	1	-
16.1	Analisis Keolahragaan	-	-	-	1	-	-

16.2	Pelatih Atlet	-	-	-	-	-	-
17	Sub.Koordinasi Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan	-	1	-	-	1	-
17.1	Analisis Keolahragaan	-	-	-	1	-	-

17.2	Pengelola Data	-	-	-	-	-	-
------	----------------	---	---	---	---	---	---

B. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagaimana terdata dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dapat dilihat pada Lampiran. Namun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor masih belum memadai seperti :

- a. Gedung perkantoran pada umumnya, karena masih Bersatu dengan Gedung Koni Kota Bogor karena Gedung kantor sebelumnya juga masih Bersatu dengan wisma atlet yang saat ini dipergunakan sebagai Rumah Sakit Lapangan;
- b. Instalasi listrik yang masih belum memenuhi kapasitas kantor;
- c. Jaringan internet kurang memenuhi kuota.

Rekap ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor

No.	Jenis Aset	Volume	Jumlah
1	2	3	4
1.	Tanah dan Bangunan Olahraga	73,499 M ²	90.129.760.000
2.	Portable water Pump	1	
3.	Mini bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	
4	Pick Up	1	
5	Mobil Double Cabin	1	
6	Sepeda Motor	7	
7	Sepeda	1	
8	Mesin Ketik Elektrik	2	
9	Mesin Foto Copy	1	
10	Lemari Besi	11	
11	Rak Besi	20	
12	Filing Cabinet	19	
13	Brandkas	1	
14	Papan Visual (Scoring Board)	3	
15	Papan White Board	2	
16	Mesin Penghancur kertas	1	
17	Papan Nama Instansi	1	

18	Screen Projector	1	
19	Ring basket Fortable	2	
20	Sice	1	
21	Meja Rapat	2	
22	Tempat Tidur susun besi	0	
23	Tempat Tidur susun Kayu	0	
24	Meja ½ biro	29	
25	Kasur / Spring Bed	100	
26	Kursi Rapat	10	
27	Kursi Tamu	7	
28	Kursi Putar	17	
29	Kursi lipat Tangan	152	
30	Sofa	2	
31	Lemari Kayu	0	
32	Papan penggantian Pemain Digital	1	
33	Mesin Potong Rumput Gendong	1	
34	Mesin Potong Rumput Dorong	0	
35	Mesin Cuci	0	
36	Lemari Es	2	
37	AC Split 1 PK	6	
38	AC Split 1 ½ PK	4	
39	AC Split 2 PK	37	
40	AC Standing Floor 5 PK	2	
41	Tabung gas	1	
42	Televisi 32"	3	
43	Televisi 29"	1	
44	Televisi 75"	1	
45	Televisi 65"	0	
46	Sound System	1	
47	Camera Digital	1	
48	Camera	1	
49	Setrika	0	
50	Tangga Alumunium	3	
51	Dispenser	2	
52	Vacuum pembersih Kolam Renang	1	
53	Toren Air 2000 liter	2	
54	Lemari Rak Buku	1	

55	Meja Resepsionis	1	
56	Podium	1	
57	Trap panggung untuk Instruktur Senam	2	
58	Fingger Print	1	
59	Mesin Air mancur	1	
60	Meja Kerja 1 biro	6	
61	Meja Kerja ½ biro	5	
62	Kursi Sandaran Tinggi	1	
63	Kursi Sandaran Rendah	16	
64	Kursi Rapat	58	
65	Lemari Arsip Pintu geser	2	
66	Film Projektor	0	
67	Tape Recording	1	
68	Projektor Infocus	1	
69	Facimili	1	
70	CCTV	16	
71	PC Unit	19	
72	Note book	1	
73	Printer	19	
74	Server	5	
75	Router	1	
76	Peralatan jaringan(UPS,ICA) Interactive UPS	1	
77	Rak Server	1	

Tabel 2.7
Daftar Sarana Prasarana dan Rencana Kebutuhan
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mini bus (Penumpang 14 orang ke bawah	2	-	-	-	1	1	1	-	3
2	Pick Up	1	-	-	-	1	-	-	-	1
3	Lain-lain Kendaraan Bermotor Khusus	1	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Sepeda Motor	4	-	1	-	3	4	-	-	11
5	Sepeda	-	1	-	-	2	1	-	-	3
6	Bus	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Mikro Bus (Elf)	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	-	-	-	-	-	-	1	-	1
9	Mobil Pemotong Rumput Stadion/Lapangan Sepakbola	-	-	-	-	-	1	-	-	1
10	Filing Cabinet Besi	15	1	3	5	5	5	5	5	25
11	Lemari Besi/Metal	8	-	-	2	2	2	1	-	7

12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	-	-	-	1	-	-	-	1
13	Alat Penghancur Kertas	1	-	3	-	-	-	-	-	-
14	Brankas	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rak Besi/Metal	20	-	4	2	-	-	-	-	2
16	White Board	1	-	2	-	1	1	1	-	3
17	Mesin Ketik Elektronik	2	-	-	-	-	-	-	-	2
18	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	0	1	-	-	1	-	-	-	1
19	Mesin Foto Copy dengan kertas Folio	-	-	1	-	2	-	1	-	3
20	Infocus	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Mesin Absen (Time Recorder)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Rak Kayu	1	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kursi Putar	14	-	3	13	15	-	-	-	28
24	Sice	1	-	-	1	1	-	-	-	2
25	Meja Rapat	2	-	-	-	1	1	1	-	3
26	Kursi Rapat	10	-	-	-	10	-	-	-	10
27	Mesin Cuci	0	-	1	-	1	-	-	-	1

28	Lemari Es	2	-	1	-	1	-	-	-	1
29	Reach in Freezer	-	-	-	-	1	-	-	-	1
30	AC Split	40		9	-	5	5	5	4	19
31	Portable Air Conditioner (Pendingin Ruangan)	2	-	2	-	1	-	-	-	1
32	Dispenser	3	-	1	-	2	2	-	-	4
33	Kompas Gas	1	-	-	-	1	-	-	-	1
34	Mesin Potong Rumput	3	-	2	-	1	-	-	-	1
35	Seterika	0	-	1	-	1	-	-	-	1
36	Sofa	5	1	2	-	-	-	-	-	-
37	Sound System	1	-	1	-	-	1	-	-	1
38	Tabung Gas	1	-	-	-	1	-	-	-	1
39	Televisi	4	-	3	-	-	-	-	-	-
40	Lemari Slang	0	13	44	-	-	-	-	-	-
41	Tangga Alumunium	2	-	1	-	2	-	-	-	2
42	Vacum Cleaner (Pembersih Lantai Kolam Renang)	2	-	1	-	-	-	-	-	-
43	Tangki Air	2	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Mimbar/Podium	1	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Alat Pembantu	3	-	-	-	3	3	3	-	9

	Kebakaran									
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	-	-	-	-	4	-	-	4
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	16	-	-	-	12	-	-	-	12
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	-	1	-	-	-	-	-	-
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	-	2	-	5	-	-	-	5
53	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	-	-	-	16	-	-	-	16
54	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	-	-	-	-	1	-	-	-	1
55	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	-	-	-	4	-	-	-	4
56	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	-	-	-	6	-	-	-	6
57	Lain-lain kursi rapat pejabat	10	-	-	-	10	-	-	-	10

58	P.C Unit	19	-	4	-	5	5	5	7	22
59	Lap Top	2	-	-	-	2	-	-	-	2
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	-	6	-	5	5	5	6	21
61	Note Book	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.7
Daftar Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mini bus (Penumpang 14 orang ke bawah	2	-	-	2	3	4	5	5
2	Pick Up	1	-	-	1	2	2	2	2
3	Lain-lain Kendaraan Bermotor Khusus	1	-	-	1	1	1	1	1
4	Bus	-	-	-	-	1	1	1	1
5	Mikro Bus (Elf)	-	-	-	-	-	1	1	1
6	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	-	-	-	-	-	-	1	1
7	Mobil Pemotong Rumput Stadion/Lapangan Sepakbola	-	-	-	-	-	1	1	1
8	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	-	-	-	1	1	1	1
9	Mesin Foto Copy dengan kertas Folio	-	-	1	-	2	2	3	3
10	Infocus	1	-	-	1	1	1	1	1
11	Mesin Cuci	0	-	1	1	1	2	2	2
12	Lemari Es	2	-	1	3	3	4	4	4
13	Reach in Freezer	-	-	-	-	1	1	1	1

14	AC Split	40		9	45	5	50	55	59
15	Portable Air Conditioner (Pendingin Ruangan)	2	-	2	4	4	5	5	5
16	Mesin Potong Rumput	1	-	4	5	5	6	6	6
17	Sound System	1	-	1	2	2	2	3	3
18	Televisi	7	-	-	7	7	7	7	7
19	Vacum Cleaner (Pembersih Lantai Kolam Renang)	1	-	2	3	3	3	3	3
20	P.C Unit	19	-	4	23	23	28	33	33
21	Lap Top	2	-	-	2	2	4	4	4
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	-	6	26	26	31	36	41
23	Note Book	-	1	-	1	1	1	1	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan sasaran / target Renstra periode sebelumnya ditampilkan dalam Tabel 2.9. (T-C.23.A), Tabel 2.10.(T-C.23.B), Tabel 2.11. (T-C.23.C), Tabel 2.12. (T-C.24), sebagai berikut :

Tabel 2.9. (T-C.23.A)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Bogor

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif				68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	100	100	100	100	100
2	Jumlah wirausaha muda yang di bina				0	100	100	50	50	0	100	100	50	50	-	100	100	100	100
3	Cakupan pembinaan olahraga				42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	100	100	100	100	100
4	Cakupan pelatih yang bersertifikas				16	30	16	17	40	16	30	16	17	40	100	100	100	100	100
5	Cakupan pembinaan atlet muda				140	204	180	128	119	140	204	180	128	119	100	100	100	100	100
6	Jumlah atlet berprestasi				41	74	260	180	463	100	150	360	814	463	243,9	202,7	138,46	452,22	100
7	Jumlah prestasi olahraga				45	80	55	232	61	150	150	55	310	61	333,33	187,5	100	133,62	100

(Sumber : Data Dispora Tahun 2019)

Dari tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas pemuda dan olahraga Kota Bogor telah mencapai target yang telah ditetapkan selama lima (5) tahun, hal ini tidak terlepas dari faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan dimaksud sebaikut berikut :

1. Kualitas Sumber daya Manusia dalam organisasi kepemudaan semakin meningkat
2. Adanya Jiwa dan semangat wirausaha muda ;
3. Aktifnya Pembina dan Pelatih pada seluruh cabang olahraga di Kota Bogor baik untuk olahraga pelajar maupun olahraga professional.

Dari enam (6) indicator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Dispora Kota Bogor terdapat dua (2) indicator Kinerja yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan yaitu : Jumlah Atlit berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga yang capaian targetnya melampaui 100 Persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor pendukung sebagai berikut :

1. Pola Pembinaan atlit baik usia muda maupun professional telah berjalan dengan baik.
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia Keolahragaan sudah baik.

Dari enam (6) indicator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Dispora Kota Bogor, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana Keolahragaan dan kepemudaan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor

Pada umumnya Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor mempunyai fokus sasaran yang sama dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat yaitu menyelenggarakan fasilitas olahraga dan pemuda. Adanya rencana struktur dan pola ruang yang dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2024 berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, dampak dan resiko lingkungan hidup, ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim serta ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Dampak terhadap pembinaan olahraga dan pemuda adalah berkurangnya fasilitas olahraga dan pemuda berupa alih fungsi apangan olahraga dan lapangan kegiatan kepemudaan menjadi pemukiman, industri, dan sebagainya. Kondisi tersebut berdampak terhadap bertambahnya beban Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mencari fasilitas pengganti, pembangunan gedung olahraga, pengadaan sarana, dan sebagainya. Lebih dari itu upaya meningkatkan prestasi melalui pemasukan dan kegiatan latihan menjadi lebih baik.

T.C - 23**Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	45	45	47	49	51	53	53
2	Rasio ketersediaan tenaga SDM tenaga keolahragaan	0,001511: 2,8	0,001552: 2,8	0,001661: 2,8	0,001734: 2,8	0,001808: 2,8	0,001887: 2,8	0,001887: 2,8
3	Persentase Kawasan GOR yang Tersedia sesuai dengan standar nasional/ lokal	16,6	16,6	16,6	49,8	83,3	100	100
4	Persentase Pemuda Pelopor yang Aktif Menggerakkan Kegiatan	20	0	0	20	20	20	60

	Kepemudaan							
5	Predikat Kota Layak Pemuda (Permenpora No.11 Tahun 2017)	30	40	50	70	80	80	80
6	Presentase Organisasi Kepramukaan yang Dibina	100	100	100	100	100	100	100

TC. 26

Realisasi Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
								TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
4						5	6	7	8	9	10	11	12
											33.869.252.710	32.780.931.101	97%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	Poin	A	B	84	10.322.244.410	9.932.296.257	96%
						Nilai Rata Rata Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Poin	3,40	3,40	100			
		1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			Nilai AKIP Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	B	84	20.000.000	17.000.000	85%

			Daerah										
				1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100	20.000.000	17.000.000	85%
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	98	98	8.133.491.121	7.960.713.736	98%
				2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	49	49	100	8.133.491.121	7.960.713.736	98%
		3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	466.620.657	382.106.259	82%
				3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100	19.494.000	19.494.000	100%
				4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Paket	7	7	100	74.942.000	72.801.500	97%

						Kantor yang Disediakan							
				5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100	16.236.000	16.236.000	100%
				6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100	118.821.000	102.951.000	87%
				7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100	37.460.800	35.998.182	96%
				8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang – undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	100	14.760.000	9.415.000	64%
				9	Sun Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket /Bahan Material yang disediakan	Paket	1	1	100	1.779.857	888.000	50%
				10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100	183.127.000	124.322.577	68%

		4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	Persen	100	100	100	231.785.180	225.428.500	97%
				11	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	3	3	100	98.250.000	92.550.000	94%
				12	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	28	28	100	133.535.180	132.878.500	100%
		5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	1.283.667.452	1.174.729.462	92%
				13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	3	3	100	694.598.204	593.395.069	85%

				14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	3	3	100	322.580.000	319.356.927	99%
				15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	7	7	100	266.489.248	261.977.466	98%
		6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	Persen	100	100	100	186.680.000	172.318.300	92%
				16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaeraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	2	100	186.680.000	172.318.300	92%

2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					Predikat Kota Layak Pemuda (Permen PORA No 11 Tahun 2017)	Predikat	40 Persen Menuju Kota Layak Pemuda	40 Persen Menuju Kota Layak Pemuda	100	1.135.976.300	1.089.611.253	96%
						Persentase Pemuda Pelopor Yang Aktif Menggerakkan Kegiatan Kepemudaan	Persen	20	0	0			
		7	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			Persentase Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan	Persen	100	100	100	575.030.900	543.104.653	94%
				17	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya	Orang	20	0	0	0	0	#DIV/0!

						saingnya							
				18	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	35	0	0%	0	0	#DIV/0!
				19	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	60	60	100	239.799.500	226.276.000	94%
				20	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang terkelola dan termanfaatkan	Unit	2	2	100	200.000.000	198.815.453	99%

				21	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan	Orang	300	140	47%	135.231.400	118.013.200	87%
		8	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah OKP yang terbina	OKP	5	5	100	560.945.400	546.506.600	97%
				22	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Dokumen	1	1	100	560.945.400	546.506.600	97%
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	Persen	100	100	100	843.140.000	829.970.200	98%
		9	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	Persen	100	100	100	843.140.000	829.970.200	98%
				23	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	laporan	1	1	100	49.140.000	35.970.200	73%

				24	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	lembaga	1	1	100	794.000.000	794.000.000	100%
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					Prosentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	47	34,1	73	21.567.892.000	20.929.053.391	97%
						Rasio Ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan (Per 916,052 Penduduk)	Per 916,052	0.00166 1 : 2.08	0.00166 1 : 2.08	100			
						Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standart nasional / lokal	Persen	16,66	16,66	100			
		10	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan	Persen	100	100	100	5.501.612.000	4.903.407.675	89%

				25	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	Unit	5	0	0	0	0	#DIV/0!
				26	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	1	1	100	101.612.000	100.268.200	99%
				27	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	1	1	100	5.400.000.000	4.803.139.475	89%
		11	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			Jumlah Perolehan Medali Tingkat Provinsi	Medali	52	72	138,4615	14.520.447.500	14.520.447.500	100%
				28	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Orang	300	350	117%	0	0	#DIV/0!

				29	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	500	505	101	14.520.447.500	14.520.447.500	100%
				30	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Penghargaan	Orang	72	76	106%	0	0	#DIV/0!
		12	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perolehan Medali	Medali	6	6	100	113.614.700	113.458.200	100%
				31	Sub Kegiatan 03.202.01. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	100	113.614.700	113.458.200	99,86%
				32	Sub Kegiatan 03.202.03. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	Orang	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		13	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persen	100	100	100	1.432.217.800	1.391.740.016	97%

				33	Sub kegiatan 03.205.02 Sub Kegiatan Peremberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	4	4	100	191.898.800	191.540.800	100%
				34	Sub Kegiatan 03.205.03. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	5	5	100	1.240.319.000	1.200.199.216	97%

Realisasi Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
								TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
4						5	6	7	8	9	10	11	12
											87.862.835.217	83.468.636.913	95%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	Poin	A	BB	88,74	11.516.077.361	10.960.460.924	95%
						Nilai Rata Rata Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Poin	3,40	3,40	100			
		1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			Nilai AKIP Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	BB	88,74	24.746.200	24.746.200	100%

			Perangkat Daerah										
				1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100	24.746.200	24.746.200	100%
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	98	98	8.576.862.917	8.402.726.431	98%
				2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	49	49	100	8.576.862.917	8.402.726.431	98%
		3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	554.950.900	423.227.255	76%
				3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100	38.974.000	38.974.000	100%

				4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100	96.337.700	94.721.300	98%
				5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100	33.355.500	33.355.500	100%
				6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100	64.350.000	35.940.000	56%
				7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100	49.907.700	49.896.475	100%
				8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang – undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	100	17.600.000	14.715.000	84%
				9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket /Bahan Material yang disediakan	Paket	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

				10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100	254.426.000	155.624.980	61%
		4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	Persen	100	100	100	896.480.100	861.457.496	96%
				11	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				12	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	29	29	100	896.480.100	861.457.496	96%
		5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	1.288.587.244	1.080.124.842	84%

				13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	3	3	100	927.657.300	766.548.624	83%
				14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	3	3	100	67.865.400	66.820.850	98%
				15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	7	7	100	293.064.544	246.755.368	84%
		6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	Persen	100	100	100	174.450.000	168.178.700	96%
				16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	2	2	100	174.450.000	168.178.700	96%

					Jabatan	pajaknya							
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					Predikat Kota Layak Pemuda (Permen PORA No 11 Tahun 2017)	Predikat	50 Persen Menuju Kota Layak Pemuda	50 Persen Menuju Kota Layak Pemuda	100	2.096.992.500	1.847.377.687	88%
						Persentase Pemuda Pelopor Yang Aktif Menggerakkan Kegiatan Kepemudaan	Persen	20	20	100			
		7	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda			Persentase Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan	Persen	100	100	100	1.489.691.500	1.249.061.687	84%

			Kader Kabupaten/Kota										
				17	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	30	30	100	0	0	#DIV/0!
				18	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	70	120	171%	291.880.300	186.075.300	64%

				19	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	100	100	100	356.599.500	303.777.100	85%
				20	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang terkelola dan memanfaatkan	Unit	2	2	100	400.000.000	353.291.287	88%
				21	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan	Orang	56	30	54%	441.211.700	405.918.000	92%
		8	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah OKP yang terbina	OKP	5	5	100	607.301.000	598.316.000	99%

				22	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Dokumen	1	1	100	607.301.000	598.316.000	99%
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	Persen	100	100	100	1.040.894.400	1.031.495.000	99%
		9	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	Persen	100	100	100	1.040.894.400	1.031.495.000	99%
				23	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	laporan	1	1	100	50.894.400	41.495.000	82%
				24	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	lembaga	1	1	100	990.000.000	990.000.000	100%
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					Prosentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	49	56,91	116,1429	73.208.870.956	69.629.303.302	95%
						Rasio Ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan (Per 916,052	Per 916,052	0,001734:2,08	0.003264:2,08	188			

						Penduduk)							
						Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standart nasional / lokal	Persen	49,98	49,98	100			
		10	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan	Persen	100	100	100	26.267.413.900	22.797.995.335	87%
				25	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	Unit	5	5	100	280.917.300	228.243.005	81%

				26	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	1	1	100	235.688.200	203.256.080	86%
				27	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	2	2	100	25.750.808.400	22.366.496.250	87%
		11	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			Jumlah Perolehan Medali Tingkat Provinsi	Medali	5	241	4820	42.065.934.500	42.054.720.700	100%
				28	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Orang	300	350	117%	239.684.500	230.720.700	96%
				29	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	500	505	101	39.575.000.000	39.575.000.000	100%
				30	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Penghargaan	Orang	72	76	106%	2.251.250.000	2.249.000.000	99,90%

		12	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perolehan Medali	Medali	5	5	100	883.778.400	849.379.200	96%
				31	Sub Kegiatan 03.202.01. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	100	351.005.800	349.405.800	99,54%
				32	Sub Kegiatan 03.202.03. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	Orang	264	274	104%	532.772.600	499.973.400	94%
		13	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persen	100	100	100	3.991.744.156	3.927.208.067	98%
				33	Sub kegiatan 03.205.02 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	4	4	100	1.389.158.600	1.365.840.200	98%
				34	Sub Kegiatan 03.205.03. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	6	6	100	2.602.585.556	2.561.367.867	98%

Realisasi Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
								TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
4						5	6	7	8	9	10	11	12
											58.345.341.233	55.994.953.404	96%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	Poin	A	A	100	11.107.289.051	11.014.082.415	99%
						Nilai Rata Rata Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Poin	3,52	3,52	100			
		1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	A	100	0	0	#DIV/0!

				1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100	0	0	#DIV/0!
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	98	98	8.717.184.011	8.401.773.802	96%
				2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	48	48	100	8.717.184.011	8.401.773.802	96%
		3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	863.467.700	1.042.089.851	121%
				3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100	32.326.900	32.326.900	100%
				4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100	68.816.800	67.640.400	98%

				5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100	326.535.000	298.770.000	91%
				6	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100	33.259.000	28.643.200	86%
				7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100	729.065.000	614.709.351	84%
		4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	Persen	100	100	100	118.217.200	117.764.980	100%
				8	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	4	4	100	118.217.200	117.764.980	100%
		5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	1.408.420.140	1.313.794.682	93%

				13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	3	3	100	1.100.595.300	1.015.762.404	92%
				14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	3	3	100	74.379.000	66.061.000	89%
				15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	7	7	100	233.445.840	231.971.278	99%
		6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	Persen	100	100	100	140.350.000	138.659.100	99%
				16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	2	2	100	140.350.000	138.659.100	99%

					Jabatan	pajaknya							
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					Predikat Kota Layak Pemuda (Permen PORA No 11 Tahun 2017)	Predikat	70 Persen Menuju Kota Layak Pemuda	70 Persen Menuju Kota Layak Pemuda	100	1.443.647.500	1.406.296.579	97%
						Persentase Pemuda Pelopor Yang Aktif Menggerakkan Kegiatan Kepemudaan	Persen	20	10	50			
		7	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			Persentase Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan	Persen	100	100	100	793.647.500	756.296.579	95%

				17	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	30	30	100	26.350.000	24.259.000	92%
				18	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	70	80	114	149.230.000	143.226.400	96%
				19	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	100	80	80	59.557.500	52.179.500	88%
				20	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang terkelola dan termanfaatkan	Unit	2	1	50	200.000.000	190.802.179	95%

				21	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan	Orang	30	30	100	358.510.000	345.829.500	96%
		8	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah OKP yang terbina	OKP	2	2	100	650.000.000	650.000.000	100%
				22	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Dokumen	1	1	100	650.000.000	650.000.000	100%
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	Persen	100	100	100	949.600.000	949.360.000	100%
		9	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	Persen	100	100	100	949.600.000	949.360.000	100%
				23	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	laporan	1	1	100	49.600.000	49.360.000	100%

				24	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	lembaga	1	1	100	900.000.000	900.000.000	100%
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					Prosentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	57	57,3	100	44.844.804.682	42.625.214.410	95%
						Rasio Ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan (Per 916,052 Penduduk)	Per 916,052	0,003264: 2,08	0,001773 : 2,08	54			
						Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standart nasional / lokal	Persen	100	50	50			
		10	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan	Persen	100	100	100	10.000.000.000	7.823.192.510	78%

			Kabupaten/Kota										
				25	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	Unit	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				26	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				27	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	2	2	100	10.000.000.000	7.823.192.510	78%

		11	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			Jumlah Perolehan Medali Tingkat Provinsi	Medali	7	74	1057,143	31.558.636.250	31.557.466.258	100%
				28	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Orang	350	400	114%	105.195.500	105.195.500	100%
				29	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	500	622	124,4	8.304.740.000	8.304.210.000	100%
				30	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Penghargaan	Orang	82	285	348%	23.148.700.750	23.148.060.758	100,00%
		12	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perolehan Medali	Medali	7	22	314,2857	700.007.032	697.922.232	100%
				31	Sub Kegiatan 03.202.01. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				32	Sub Kegiatan 03.202.03. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	Orang	264	253	96%	700.007.032	697.922.232	100%

		13	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persen	100	100	100	2.586.161.400	2.546.633.410	98%
				33	Sub kegiatan 03.205.02 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	4	4	100	1.586.161.400	1.551.802.400	98%
				34	Sub Kegiatan 03.205.03. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	6	4	66,66667	1.000.000.000	994.831.010	99%

Pada Tabel 2.12. (T-C.24) menjabarkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga di tahun 2021, 2022 dan 2023 telah mengacu pada RPJMD Perubahan berdasarkan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2021 memiliki 3 program utama disamping Program Penunjang, diantaranya sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan, bertujuan:
 - Mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - Meningkatkan Kesehatan jamani dan rohani, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing;
 - Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kemandirian;
 - Mengembangkan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan, bertujuan;
 - Untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kebugaran bagi masyarakat;
 - Pembinaan olahraga menyangkut :
 - Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh Guru/Dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung sarana dan prasarana olahraga yang memadai, pembelajaran yang sistimatis, berjenjang serta berkesinambungan;
 - Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi/tradisional diarahkan untuk memasalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial;
 - Pembinaan olahraga prestasi, dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
 - Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga bertujuan:
 - Memudahkan masyarakat untuk menggali dan mengembangkan serta memajukan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan Pendidikan;

- Sebagai sarana untuk masyarakat supaya gemar berolahraga dan mengetahui manfaat berolahraga untuk kesehatan dan kebugaran jasmani;
- Sebagai gagasan untuk menjadikan olahraga sebagai sendi kehidupan masyarakat bukan hanya sekedar memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan industri olahraga dengan memproduksi Produk yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan keolahragaan

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Pramuka adalah wadah menjalankan aktifitas bagi pemuda-pemudi Anggota Pramuka berdasarkan pada Program Pemerintah khususnya pendidikan Luar sekolah/pendidikan non formal. Tujuan dari kegiatan yang terdapat dalam Program Kepramukaan adalah untuk mengedukasi dan menjalankan aktifitas bagi pemuda-pemudi pramuka berdasarkan program pemerintah khususnya pendidikan Luar sekolah/pendidikan non formal, memilih peserta untuk mengikuti kegiatan pemilihan Pramuka Juara Tingkat Jawa Barat, dan agar peserta dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kepramukaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini, akan menguraikan isu-isu strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor untuk periode 2025-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor. Pembentukan isu-isu strategis Dinas didasarkan atas beberapa komponen yang telah dianalisis terkait dokumen RPJPD Kota Bogor 2005-2025, dokumen RPJMD Kota Bogor 2020-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan lain sebagainya.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang disampaikan merupakan kondisi yang menjadi fokus pelaksanaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor yang perlu diperhatikan, yakni terkait permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga, Kurangnya inovasi dan kreativitas pemuda dan lain sebagainya

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 131 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga, bahwa tugas Dispora Kota Bogor yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga, sedangkan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan Olahraga;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Pemuda dan Olahraga;

4. Pelaksanaan teknis operasional di bidang Pemuda dan Olahraga;
5. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemuda dan Olahraga;
7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemuda dan Olahraga;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan masih perlu ditingkatkan
2. Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih perlu ditingkatkan
3. Partisipasi Masyarakat berolahraga masih perlu ditingkatkan
4. Angka Kebugaran Masyarakat masih perlu ditingkatkan
5. Prestasi Olahraga masih perlu ditingkatkan
6. Kurangnya inovasi dan kreativitas pemuda
7. Masih Tingginya angka kenakalan Remaja
8. Kurangnya jumlah Pemuda yang memiliki kemandirian ekonomi, kepeloporan dan kewirausahaan
9. Partisipasi kepemimpinan Pemuda terhadap pembangunan masih perlu ditingkatkan
10. Masih minimnya kader pemuda berbasis gender.

Permasalahan yang berkembang saat ini pada sektor Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Bogor dapat dirumuskan pada Tabel 3.1.(T-B.35) sebagai berikut:

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok		Masalah		Akar Masalah	
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
1	Pembangunan Olahraga belum optimal	Pembangunan Olahraga belum optimal	Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan masih perlu ditingkatkan	Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan masih perlu ditingkatkan	Rasio SDM Keolahragaan belum memenuhi Standar	Rasio SDM Keolahragaan belum memenuhi Standar
					Jumlah SP3OR (Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olah Raga)	Jumlah SP3OR (Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olah Raga)
					Masih minimnya fasilitas pelatihan bagi tenaga keolahragaan	Masih minimnya fasilitas pelatihan bagi tenaga keolahragaan
			Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih perlu ditingkatkan	Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih perlu ditingkatkan	Kuantitas dan kualitas belum sesuai standar	Kuantitas dan kualitas belum sesuai standar
					Adanya sarana dan prasarana yang beralih fungsi Belum ramah difabel	Adanya sarana dan prasarana yang beralih fungsi Belum ramah difabel
					Sebaran sarana prasarana belum terkonsentrasi per wilayah pengembangan/Kecamatan	Sebaran sarana prasarana belum terkonsentrasi per wilayah pengembangan/Kecamatan

					Belum terpenuhinya revitalisasi dan pengembangan kawasan GOR sesuai dengan revisi masterplan	Belum terpenuhinya revitalisasi dan pengembangan kawasan GOR sesuai dengan revisi masterplan
					Perlu adanya penyesuaian retribusi sarana dan prasarana olahraga	Perlu adanya penyesuaian retribusi sarana dan prasarana olahraga
			Partisipasi Masyarakat berolahraga masih perlu ditingkatkan	Partisipasi Masyarakat berolahraga masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya upaya pembudayaan Olahraga di masyarakat sampai unit terkecil keluarga	Belum optimalnya upaya pembudayaan Olahraga di masyarakat sampai unit terkecil keluarga
					Masih terbatasnya tenaga penggerak Olahraga di Wilayah Kecamatan	Masih terbatasnya tenaga penggerak Olahraga di Wilayah Kecamatan
			Angka kebugaran Masyarakat perlu ditingkatkan	-	Belum tersedianya tenaga teknis untuk mengukur Tes Kebugaran	Belum tersedianya tenaga teknis untuk mengukur Tes Kebugaran -

					Belum tersedianya alat pengukur tes kebugaran	-
					Pengukuran Angka Kebugaran belum terlaksana	-
					Pola Pembinaan dan Pembibitan yang belum optimal	Pola Pembinaan dan Pembibitan yang belum optimal
					Belum tersediannya standarisasi kategori/jenjang Atlit, pelatih dan wasit	Belum tersediannya standarisasi kategori/jenjang Atlit, pelatih dan wasit
2	Pembangunan Kepemudaan belum optimal	Pembangunan Kepemudaan belum optimal	Kurangnya Inovasi dan kreatifitas Pemuda	Kurangnya Inovasi dan kreatifitas Pemuda	Belum terselenggaranya seleksi tingkat dasar, kader, yunior ke jenjang senior	Belum terselenggaranya seleksi tingkat dasar, kader, yunior ke jenjang senior
					Minimnya keahlian / kemampuan yang dimiliki pemuda	Minimnya keahlian / kemampuan yang dimiliki pemuda
					Kurangnya ruang dan tempat /sarana dan prasarana untuk berekpresi dan kreasi pemuda di setiap kecamatan	Kurangnya ruang dan tempat /sarana dan prasarana untuk berekpresi dan kreasi pemuda di setiap kecamatan
			Masih Tingginya Angka Kenakalan Remaja	Masih Tingginya Angka Kenakalan Remaja	Belum ditetapkan PERDA Kepemudaan	Belum tersedianya PERWALI Penyadaran, Pembinaan dan Pengembangan

						Pelayanan Kepemudaan
-	-	-			Masih adanya remaja / pemuda yang terkena napza, peran keluarga yang masih rendah	Masih tingginya pengguna Napza di kalangan pemuda
			Parisipasi dan kepemimpinan pemuda terhadap pembangunan masih perlu ditingkatkan	Parisipasi dan kepemimpinan pemuda terhadap pembangunan masih perlu ditingkatkan	Kurangnya pengawasan terhadap pergaulan pemuda	Kurangnya pengawasan terhadap pergaulan pemuda
					Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri	Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri
			Masih minimnya kader pemuda berbasis gender	Masih minimnya kader pemuda berbasis gender	Belum optimalnya peran keaktifan pemuda dan komunitas	Belum optimalnya peran keaktifan pemuda dan komunitas
					Masih minimnya fasilitasi kegiatan kepemudaan berbasis gender	Masih minimnya fasilitasi kegiatan kepemudaan berbasis gender
					Masih minimnya ruang dan tempat / sarana dan prasarana untuk berekpresi dan kreasi pemuda yang ramah difabel dan berbasis gender	Masih minimnya ruang dan tempat / sarana dan prasarana untuk berekpresi dan kreasi pemuda yang ramah difabel dan berbasis gender

Upaya Dinas Pemuda dan Olahraga yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kota Bogor, serta mitra – mitra kerja Dispora.

Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagai salah satu Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mengemban amanah untuk mewujudkan semua misi pemerintah Kota Bogor.

Sedangkan Program Kepala Daerah di Bidang Pemuda dan Olahraga meliputi 4 program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Daya saing Kepemudaan, Peningkatan Kapasitas Daya saing Keolahragaan, Peningkatan Kapasitas Kepramukaan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan indikator Kinerja sasaran meliputi Persentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO).

Dalam rangka memberikan pelayanan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Bogor dapat dirumuskan faktor faktor yang menjadi penghambat dan pendorong terhadap pelayanan sebagaimana tabel berikut :

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor

No	Permasalahan Pada Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan masih perlu ditingkatkan	Rasio SDM Keolahragaan belum memenuhi Standar	1. Adanya dukungan Anggaran dari pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah untuk meningkatkan kemandirian SDM Keolahragaan, SDM Kepemudaan dan Prestasi Olahraga melalui Pendidikan, Pelatihan dan event Olahraga 2. Adanya kebutuhan dari masyarakat untuk memusatkan sarana prasarana olahraga di wilayah/Kecamatan 3. Adanya Renovasi Sarana Olahraga di Lingkungan Dispora sesuai dengan Masterplan yang sudah di buat
		Jumlah SP3OR (Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan masih kurang	
		Masih minimnya fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga keolahragaan	
	Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih perlu ditingkatkan	Kuantitas dan kualitas belum sesuai standar	
		Adanya sarana dan prasarana yang beralih fungsi	

		Belum ramah difabel
		Sebaran sarana prasarana belum terkonsentrasi per wilayah pengembangan /Kecamatan
		Belum terpenuhinya revitalisasi dan pengembangan kawasan GOR sesuai dengan revisi masterplan

	Partisipasi Masyarakat berolahraga masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya upaya pembudayaan Olahraga di masyarakat sampai unit terkecil keluarga	
		Masih terbatasnya tenaga penggerak Olahraga di Wilayah Kecamatan	
	Angka kebugaran Masyarakat perlu ditingkatkan	Jarak Menuju pusat kegiatan olahraga relatif jauh	
		Belum tersedianya tenaga teknis untuk mengukur Tes Kebugaran	
	Prestasi Olahraga masih perlu ditingkatkan	Belum tersediangan alat pengukur tes kebugaran	
		Pola Pembinaan dan Pembibitan yang belum optimal	
		Belum tersediannya standarisasi kategori/ jenjang Atlit, pelatih dan wasit	
		Belum tersedianya wadah pembibitan olahragawan pelajar yang berbentuk Pendidikan dan Latihan olahraga pelajar Daerah (PPLPD)	

	Kurangnya Inovasi dan kreatifitas Pemuda	Minimnya keahlian / Kemampuan yang dimiliki pemuda	
		Kurangnya ruang dan tempat /sarana dan prasarana untuk berekspresi dan kreasi pemuda di setiap kecamatan	
		Belum tersedianya Perwali Penyadaran, Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	
	Masih Tingginya Angka Kenakalan Remaja	Masih adanya remaja /pemuda yang terkena napza, peran keluarga yang masih rendah	
		Kurangnya pengawasan terhadap pergaulan pemuda	
	Kurangnya jumlah pemuda yang memiliki kemandirian, ekonomi, kepeloporan dan kewirausahaan	Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri	
		Belum optimalnya peran keaktifan pemuda dan komunitas	
	Parisipasi dan Kepemimpinan pemuda terhadap pembangunan masih perlu	Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri	

	ditingkatkan	belum tersedianya Dokumen Aksi Daerah Kepemudaan	
	Masih minimnya kader pemuda berbasis gender	Masih minimnya Fasilitas kegiatan Kepemudaan berbasis gender	
		Masih minimnya ruang dan tempat / sarana dan prasarana untuk berekspresi dan kreasi pemuda yang ramah Difabel dan berbasis gender	

Adapun untuk pencapaian target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kementerian Pemuda Tahun 2020 - 2024, ada beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu :

1. Peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan kepemudaan
2. Peningkatan koordinasi lintas sector penyelenggara pelayanan kepemudaan
3. Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda
4. Peningkatan partisipasi aktif dalam pemberdayaan pemuda
5. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan kewirausahaan dan daya saing global pemuda
6. Pengembangan Gerakan Pramuka
7. Pembinaan Olahraga Prestasi
8. Kepemudaan dan keolahragaan

Dari hasil penelaahan terhadap dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 - 2024, maka keselarasan Rencana Strategis antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah terakomodir, terbukti dengan kesamaan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran lainnya, sebagaimana tercantum dalam table berikut :

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis
Kementrian Pemuda dan Olahraga**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas pemuda dan Olahraga Kota Bogor	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga dan prestasi Olahraga 2. Perolehan medali pada multi event tingkat wilayah dan provinsi jawa barat (porda, popda, popwilda, porpemda, pospeda, peparda dan peparpeda) . 3. Tingkat pemenuhan sarana prasarana pemuda dan olahraga 4. Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran. 5. Meningkatnya Prestasi Pemuda, Peran Pemuda, Organisasi dan Komunitas dalam mewujudkan Pembangunan Pemuda yang berkualitas	Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan masih perlu ditingkatkan	Rasio SDM Keolahragaan belum memenuhi Standar	1. Adanya dukungan Anggaran dari pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah untuk meningkatkan kemandirian SDM Keolahragaan, SDM Kepemudaan dan Prestasi Olahraga melalui Pendidikan, Pelatihan dan event Olahraga 2. Adanya kebutuhan dari masyarakat untuk memusatkan sarana prasarana olahraga di wilayah/Kecamatan 3. Adany Renovasi Sarana Olahraga di Lingkungan Dispora sesuai dengan masterplan yang sudah di buat

			Jumlah SP3OR (Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan)	
			Masih minimnya fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga keolahragaan	
		Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih perlu ditingkatkan	Kuantitas dan kualitas belum sesuai standar	
			Adanya sarana dan Prasarana yang beralih fungsi	
			Belum ramah difabel	
			Sebaran sarana Prasarana belum terkonsentrasi per wilayah pengembangan /Kecamatan	
			Belum terpenuhinya revitalisasi dan pengembangan kawasan GOR sesuai dengan revisi masterplan	
			Perlu adanya penyesuaian retribusi sarana dan prasarana olahraga	
		Partisipasi berolahraga ditingkatkan Masyarakat masih perlu	Belum optimalnya upaya pembudayaan Olahraga di masyarakat sampai unit terkecil keluarga	
			Masih terbatasnya tenaga penggerak Olahraga di Wilayah Kecamatan	

			Jarak Menuju pusat kegiatan olahraga relatif jauh	
			Pengukuran Partisipasi Masyarakat Terlaksana Angka belum	
		Angka Masyarakat ditingkatkan kebugaran perlu	Belum tersedianya tenaga teknis untuk mengukur Tes Kebugaran	
			Belum tersedianya alat pengukur tes kebugaran	
			Pengukuran Kebugaran Terlaksana Angka belum	

		Prestasi Olahraga masih perlu ditingkatkan	Pola Pembinaan dan Pembibitan yang belum optimal	
			Belum tersediannya standarisasi kategori /jenjang Atlit, pelatih dan wasit	
			Belum tersedianya wadah pembibitan olahragawan pelajar yang berbentuk Pendidikan dan Latihan olahraga pelajar Daerah (PPLPD)	
		Kurangnya Inovasi dan kreatifitas Pemuda	Minimnya keahlian / kemampuan yang dimiliki pemuda	
			Kurangnya ruang dan tempat/sarana dan prasarana untuk berekpresi dan kreasi pemuda di setiap kecamatan	
			Belum tersedianya Perwali Kepemudaan	
		Masih Tingginya Angka Kenakalan Remaja	Masih adanya remaja / pemuda yang terkena napza, peran keluarga yang masih rendah	
			Kurangnya pengawasan terhadap pergaulan	

			pemuda	
		Kurangnya jumlah pemuda yang memiliki kemandirian ekonomi, kepelopran dan kewirausahaan	Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri	
			Belum optimalnya peran keaktifan pemuda dan komunitas	
		Parisipasi dan Kepemimpina pemuda terhadap pembangunan masih perlu ditingkatkan	Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri	
			Belum optimalnya peran keaktifan pemuda dan komunitas	
		Masih minimnya kader pemuda berbasis gender	Masih minimnya fasilitasi kegiatan kepemudaan berbasis gender	
			Masih minimnya ruang dan tempat / sarana dan prasarana untuk berekpresi dan kreasi pemuda yang ramah difabel dan berbasis gender	

3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan perencanaan pembangunan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) yang disusun harus dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan kedepan, termasuk didalamnya, kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Oleh karena itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan, dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di kota Bogor sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya, khususnya dari aspek spasial.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi kota yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota sehingga dapat menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Oleh karenanya Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga wajib menelaah dan mempedomani rencana tata ruang yang telah ditetapkan untuk setiap perumusan dokumen perencanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah Kota Bogor tahun 2019-2024, telaahan terhadap Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, maka Isu Strategis dalam perumusan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun 2025- 2026 yaitu :

Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Bogor sebagai Kota Layak Pemuda, KotaPrestasi dan berbudaya olahraga masih belum optimal

Keterkaitan antara isu strategis dan permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Urusan wajib pemerintah di bidang pemuda dan olahraga	Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Bogor sebagai Kota Layak Pemuda, Kota Prestasi dan berbudaya Olahraga masih belum optimal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

Perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Berbeda dengan periode 2025-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kota Bogor merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025.

Periode penyusunan RPD Kota Bogor 2025-2026 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJPD Kota Bogor 2005-2025, yang merupakan tahap Usaha Peningkatan Berkelanjutan. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bogor periode tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan sebagaimana tertuang dalam dalam RPJPD Kota Bogor 2005-2025 adalah:

“Kota Jasa yang Nyaman dengan masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah”

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2023 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, Pemerintah Kota Bogor merekonstruksi pencapaian visi RPJPD dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026, yang mana merupakan dasar bagi Dinas Pemuda dan Olah Raga menentukan tujuan dan Sasaran Dinas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2025 dan 2026. Tujuan tersebut harus konsisten dengan tupoksi yang kemudian akan menjadi arah strategi organisasi dan perbaikan- perbaikan yang akan dicapai kedepan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan.

Sejalan dengan kedudukan tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan tujuan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas;
2. Terwujudnya Pembudayaan Olah raga pada Masyarakat;
3. Terwujudnya Pemuda yang cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan.

Sasaran dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya pembudayaan Olah raga dan peningkatan kapasitas serta daya saing olahraga;
4. Meningkatnya kapasitas dan daya saing pemuda.

Tabel T.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

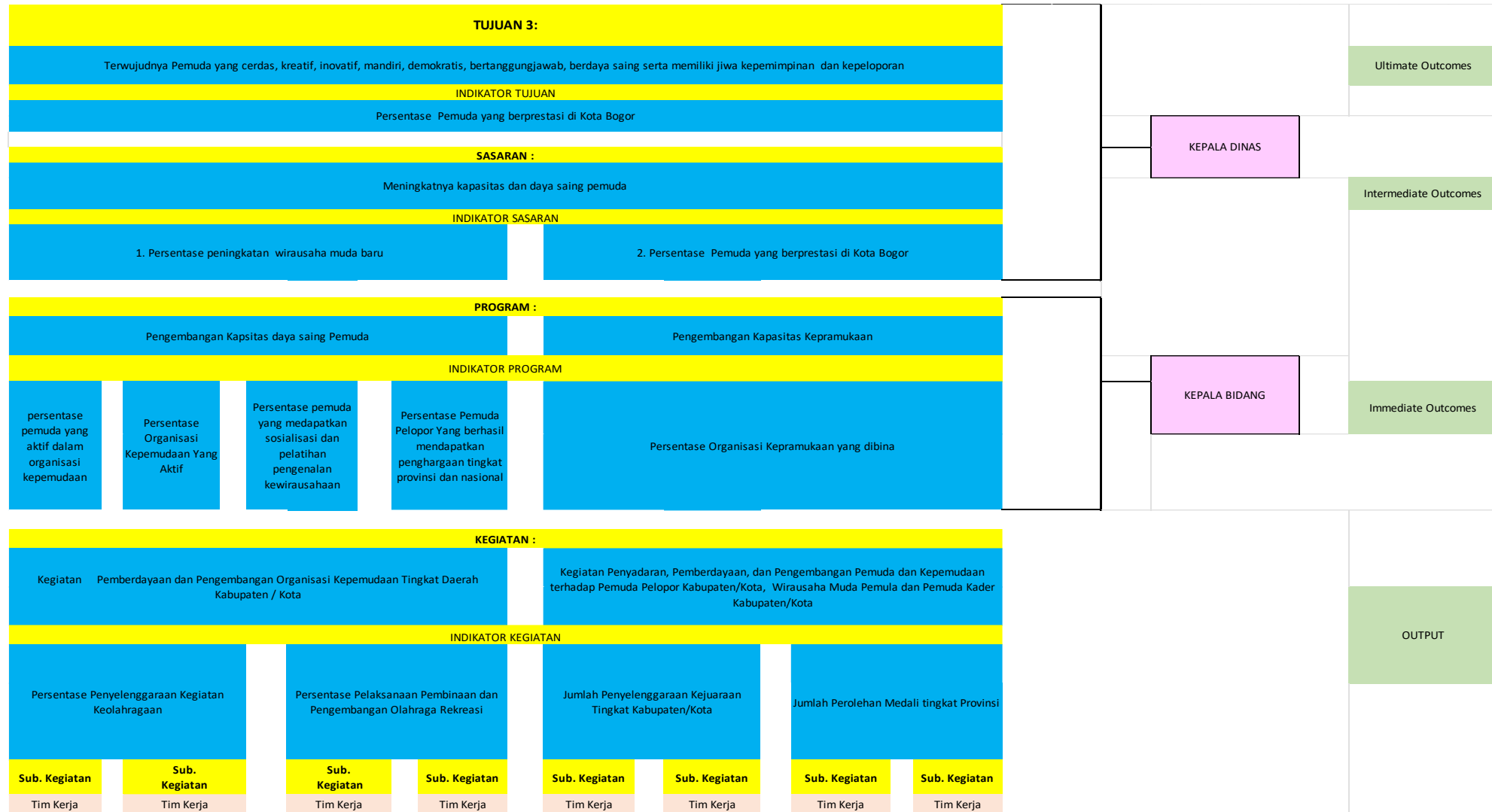
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
1.	Tujuan 1: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		Predikat Sakip Di Lingkup Perangkat Daerah	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Perangkat Daerah	3,55	3,57
		Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	83,20	83,30
			2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	91 %	92 %
			3. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95 %	95 %
			4. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	≥1 Inovasi/tahun/PD	≥1 Inovasi/tahun/PD

		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	88,75	89,25
2.	Tujuan 1 : Terwujudnya pembudayaan Olah Raga pada Masyarakat		Indeks Pembangunan Olahraga/SDI	0,274	0,274
		Sasaran 1 : Meningkatnya pembudayaan Olah raga dan peningkatan kapasitas serta daya saing olahraga	1. Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO)	59 %	60 %
			2. Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi	10 %	50%
3	Tujuan 2: Terwujudnya Pemuda yang cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan		Persentase Pemuda yang berprestasi di Kota Bogor	0,0002%	0,0003%
		Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas dan daya saing pemuda	Persentase peningkatan wirausaha muda baru	1,8 %	2,1 %
			Persentase Pemuda yang berprestasi di Kota Bogor	0,0002%	0,0003%

Berikut Cascading Dispora 2025-2026:

TUJUAN 1:											KEPALA DINAS	Ultimate Outcomes	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas													
INDIKATOR TUJUAN													
1. PREDIKAT SAKIP DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH 2. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH													
SASARAN :											SEKRETARIS DINAS	Intermediate Outcomes	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah									
INDIKATOR SASARAN													
1. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah 2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itdda 3. Ideks Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah 4. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 70)													
PROGRAM :												Immediate Outcomes	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
INDIKATOR PROGRAM													
IK 1: Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja IK 2: Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja IK 3: Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja IK 4: Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal IK 5 : perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah IK 6 : Persentase pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi IK 7 : Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu IK 8 : Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan IK 9 Persentase Kepatuhan Anggaran IK 10 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA IK 11 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah IK 12 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana IK 12 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM IK 13 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan IK 14 : Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan													
KEGIATAN :												OUTPUT	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
INDIKATOR KEGIATAN													
Nilai AKIP Lingkup Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Sub. Kegiatan	Sub. Kegiatan	Sub. Kegiatan	Sub. Kegiatan	Sub. Kegiatan	Sub. Kegiatan	Sub. Kegiatan	Sub. Kegiatan	Sub. Kegiatan					
Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja					





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pemahaman yang diperlukan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga untuk mengelola setiap program kegiatannya dengan menyusun metode, tahapan, atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Jika perencanaan digunakan secara efektif dan efisien sebagai strategi pembangunan, itu akan meningkatkan pencapaian kuantitas dan kualitas pembangunan daerah. Strategi akan dijelaskan dalam arah kebijakan, yang merupakan program prioritas setiap tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olah Raga, dengan tetap teguh pada prinsipnya untuk melayani masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai rumusan strategi yang telah dibuat. Rumusan strategi berisi pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, dan merupakan salah satu referensi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Ini akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai.

Arah kebijakan adalah daftar prioritas kerja yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar untuk rencana pelaksanaan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan mengantisipasi masalah strategis yang akan muncul di perangkat daerah. Isu-isu ini dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olah Raga, strategi akan diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata untuk mewujudkan visi Dinas Pemuda dan Olah Raga. Arah kebijakan dan strategi akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi Pembangunan Daerah. Selain itu, arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran secara bertahap selama dua tahun. Arah kebijakan yang diterjemahkan pada tabel berikut ini akan difokuskan pada strategi-strategi yang telah dibahas sebelumnya.

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor

5. 1 Strategi

1. Meningkatkan pelaksanaan Birokrasi Pemerintahan, Kinerja dan kualitas pelayanan Publik di lingkup Dinas Pemuda dan Olah melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di lingkup Dinas Pemuda dan Olah Raga melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi;
4. Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam kegiatan keolahragaan dan Pembudayaan Olahraga di Masyarakat berbasis keluarga;
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industry olahraga
6. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga secara sistimatis berjenjang dan berkelanjutan;
7. Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreativitas dan Inovasi generasi muda
8. Menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi generasi muda di Kota Bogor

5. 2 Kebijakan

Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor tahun

2025-2026 meliputi :

1. Memperkuat birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang profesional dan smart melalui penyelenggaraan Pelaksanaan Kinerja sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku;
2. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor melalui
 4. penetapan SOP dan Standar Pelayanan yang selalu terupdate;
5. Meningkatkan Pembudayaan Olahraga di Masyarakat berbasis keluarga;
6. Mewujudkan Sarana Prasarana Olahraga di Kota Bogor yang lebih memadai sesuai Standar Nasional;
 - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan industry olahraga melalui kemitraan dan Kerjasama yang saling menguntungkan yang dilaksanakan pelaku usaha, organisasi olah raga dan Masyarakat;
7. Mengembangkan Kerjasama dan informasi keolahragaan;
8. Menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan dan pembibitan atlet, pelatih dan wasit untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kota Bogor;
9. Mewujudkan peningkatan prestasi olahraga melalui Pembinaan sejak usia dini dan berkelanjutan dengan membentuk Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) dan Pemberian Penghargaan bagi Atlet Berprestasi;
10. Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan dan pengembangan prestasi pemuda;
11. Meningkatkan upaya pencegahan penggunaan narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras pada generasi muda melalui Sosialisasi dan Penyuluhan bahaya Narkoba Psikotropika dan Minuman Keras kepada generasi muda di
 12. Kota Bogor;
13. Meningkatkan jejaring untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi melalui RAD (Rencana Aksi Daerah) tentang Kepemudaan di Kota Bogor;
 - Menyelenggarakan sosialisasi Kepemudaan dan Pelatihan Soft skill bagi calon Wirausaha muda pemula untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5.4
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1: Terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Birokrasi Pemerintahan, Kinerja dan kualitas pelayanan Publik di lingkup Dinas Pemuda dan Olah melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi	Memperkuat birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang profesional dan smart melalui penyelenggaraan Pelaksanaan Kinerja sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku.
		Meningkatkan Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di lingkup Dinas Pemuda dan Olah Raga melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor melalui penetapan SOP dan Standar Pelayanan yang selalu terupdate

Tujuan 2: Terwujudnya Pembudayaan Olahraga pada Masyarakat	Sasaran 2.1 : Meningkatnya pembudayaan Olahraga dan peningkatan kapasitas serta daya saing olahraga	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam kegiatan keolahragaan dan Pembudayaan Olahraga di Masyarakat berbasis keluarga	Meningkatkan Pembudayaan Olahraga di Masyarakat berbasis keluarga
		Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industry olahraga	Mengembangkan Kerjasama dan informasi keolahragaan
			Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan industry olahraga melalui kemitraan dan Kerjasama yang saling menguntungkan yang dilaksanakan pelaku usaha, organisasi olah raga dan Masyarakat
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga secara sistimatis berjenjang dan berkelanjutan	Mewujudkan Sarana Prasarana Olahraga di Kota Bogor yang lebih memadai sesuai Standar Nasional
			Menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan dan pembibitan atlit, pelatih dan wasit untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kota

			Bogor
			Mewujudkan peningkatan prestasi olahraga melalui Pembinaan sejak usia dini dan berkelanjutan dengan membentuk Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) dan Pemberian Penghargaan bagi Atlet Berprestasi
Tujuan 3: Terwujudnya Pemuda yang cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan	Sasaran 3.1 : Meningkatnya kapasitas dan daya saing pemuda	Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreativitas dan Inovasi generasi muda	Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan dan pengembangan prestasi pemuda
			Meningkatkan upaya pencegahan penggunaan narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras pada generasi muda melalui Sosialisasi dan Penyuluhan bahaya Narkoba Psikotropika dan Minuman Keras kepada generasi muda di Kota Bogor.

		Menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi generasi muda di Kota Bogor	Meningkatkan jejaring untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi melalui RAD (Rencana Aksi Daerah) tentang Kepemudaan di Kota Bogor
			Menyelenggarakan sosialisasi Kepemudaan dan Pelatihan Soft skill bagi calon Wirausaha muda pemula untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pemuda dan OLAHRAGA KOTA BOGOR TAHUN 2025 – 2026

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bogor diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Kota Bogor dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Penetapan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor yang diturunkan dalam Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang mendukung Pembangunan Daerah Kota Bogor. Program- program pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor, mana kami jabarkan dalam matriks Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor tahun anggaran 2025 dan 2026 mulai dari Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan sebagai berikut :

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025	
					Target	Rp.
Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	point		24,67	27,01	13.861.043.591
	2 :Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	point		22,13	26,55	
	3 :Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	point		11,15	12,48	
	4 : Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	point		23,55	23,75	
	5 : persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%		100	100	
	6. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%		NA	100	

	7 : Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%		NA	94	
	8 : Persentase Kepatuhan Anggaran	%		NA	95	
	9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	%		96	97	
	10 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%		NA	100	
	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	point		88,13	88,75	
Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	point		89,25	89,50	
	2 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	point		90,00	90,50	
	3 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	point		89,30	89,50	

	4 : Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan	point		87,50	88,38	
Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan pada Perangkat daerah	persen		100	100	90.000.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	4	5	5.000.000
1. Penyusunan dokumen renstra		dokumen			1	1.000.000
2. penyusunan Renja Murni dan Renja Perubahan		dokumen		1	1	1.000.000
3. Penyusunan Dokumen LKPJ		dokumen		1	1	1.000.000
4. Penyusunan Dokumen Management Resiko Kinerja		dokumen		1	1	1.000.000
5. Penyusunan Dokumen LKIP		dokumen		1	1	1.000.000

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	NA	NA	10	85.000.000
Jasa Konsultansi Managemen : SP, SOP,dan SKM		paket	NA	NA	1	75.000.000
Cetak buku Laporan		buku	NA	NA	25	10.000.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%		98%	100%	8.738.413.866
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	#	46	52	8.738.413.866
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah		#	100	100	1.051.989.000
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	40.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		Paket	1	1	1	40.000.000

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	6	80.480.900
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		Paket			1	2.370.000
Belanja Isi Tabung Gas 12 Kg		Paket			1	2.853.600
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Paket			1	34.560.800
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Paket			1	20.219.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		Paket			1	15.677.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		Paket			1	4.800.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	3	40.250.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		Paket			1	38.246.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		Paket			1	222.000
Belanja Natura dan Pakan-Natura		Paket			1	1.782.000

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	250.000.000
Belanja Natura dan Pakan-Natura		Paket			1	21.560.000
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		Paket			1	228.440.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	50.527.600
Penggandaan/Fotocopy		Paket			1	30.000.000
Belanja Cetak Spanduk		Paket			1	20.527.600
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang – undangan yang disediakan	dokumen	2	2	-	-
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	3	590.730.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Laporan			1	15.730.000
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		Laporan			1	75.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Laporan			1	500.000.000

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	%	#	100	100	706.151.700
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit	0	0	1	100.000.000
Belanja Modal Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4		unit			0	-
Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 3 (Motor Sampah)		unit			2	100.000.000
Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2		unit			2	90.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	#	29	44	478.240.700
Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan		unit				106.080.000
BM AC Standing Floor		unit			4	116.086.800
BM AC Split		unit			6	31.368.600
BM Personal Computer		unit			7	141.381.100
BM Printer Multifungsi		unit				-
BM Laptop		unit				-
BM Camera CCTV		unit			14	37.976.400
BM Camera Digital		unit			2	32.147.800
BM Smart TV		unit				-
BM Mesin Penghancur		unit			4	13.200.000

Kertas						
BM Drone Camera		unit				-
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	NA	NA	3	127.911.000
BM Filling Cabinet		Paket			1	36.383.000
BM Tempat Tidur Besi		Paket			1	79.010.000
BM Meja Kerja 1/2 biro		Paket			1	12.518.000
Karpet		Paket				-
BM Kursi Kerja Pejabat		Paket				-
BM Sofa Tamu		Paket				-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	#	100	100	2.310.499.025
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	3	3	3	1.541.068.545
Belanja Tagihan Air		laporan			1	742.500.000
Belanja Tagihan Listrik Kantor dan Gedung Sarana Prasarana Olahraga		laporan			1	794.750.000

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		laporan			1	10.800.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	3	3	3	80.900.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		laporan			1	18.300.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		laporan			1	21.900.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		laporan			1	20.700.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	7	7	7	688.530.480
Belanja Jasa Tenaga Administrasi		laporan		693.990.755	1	83.200.000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		laporan		500.000.000	1	164.010.000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan		laporan			1	292.500.000
Belanja Jasa Tenaga Supir		laporan			1	71.000.000

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		laporan			1	41.688.000
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		laporan			1	1.658.880
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		laporan			1	2.073.600
Belanja Jaminan Hari Tua		laporan				32.400.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	%	#	100	100	963.990.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	2	2	3	183.990.000
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		unit			1	8.500.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II		unit			1	42.090.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		unit			1	133.400.000

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	unit	NA	NA	1	260.000.000
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa		unit				6.000.000
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan		unit				30.000.000
BM Pemeliharaan Gedung Kantor		unit				200.000.000
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan		unit				24.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	unit	NA	NA	2	520.000.000
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa						-
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan						-
Perbaikan halaman depan gedung						-
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan						-
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa						6.000.000
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan						30.000.000

BM Pengadaan Partisi Ruang dan Front Office Tahap I		unit			1	200.000.000
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan						24.000.000
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa						-
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan						-
BM Pengadaan Partisi Ruang dan Front Office Tahap II		unit				-
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan						-
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa						6.000.000
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan						30.000.000
BM Penataan Taman Kantor, Pos Satpam dan Papan nama Kantor Dispora		unit			1	200.000.000
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan						24.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Persentase pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional/ Internasional	%	NA	50	50	89.867.423.000
	2. Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar	%	NA	NA	80	

	3. Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	%		74	50	
	4. Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	Persen		NA	50%	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan	%	#	100	100	2.020.438.000
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan Tk. Kab/Kota	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	lokasi	5	0	5	500.000.000
Pendataan Sentra Olahraga di Kota Bogor		lokasi			5	500.000.000

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	1	0	2	788.000.000
Sport Development Indeks (SDI)	Sport Development Indeks (SDI)	dokumen			1	288.000.000
	Belanja Atk, Cetak spanduk dan Foto Copy					10.000.000
	Belanja bahan kegiatan kantor kertas dan coper					4.000.000
	Belanja peralatan dan pendukung olahraga					64.000.000
	Belanja Snak rapat, jamuan tamu NasiBox dan Snak					57.000.000
	Honorarium tim kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan					20.900.000
	Belanja perjalanan dinas dalam kota/ pengganti tranport					122.850.000
	Belanja modal alat kesehatan umum/ timbangan badan					5.000.000
	Air Mineral					4.250.000
Senam Bogor Berlari Edisi 2	dokumen				1	500.000.000

	Belanja Atk,Cetak spandukdan Foto Copy					10.000.000
	Buku panduan					7.500.000
	Dekorasi kegiatan					10.000.000
	Juri perlombaan					16.000.000
	Bahan jasa penyelenggara acara(Vidio Suting)					30.000.000
	hadiah Perlombaan					45.000.000
	Sank rapat dan jamuan tamu nasi bok, snak					25.000.000
	pelatihan senam seris 2 (ful bot)					-
	uang harian peserta					27.500.000
	sosialisasi senam seris 2, 6 kecamatan kota bogor					119.000.000

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tk. Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	unit	2		6	732.438.000
Reviu DED Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga Kecamatan Bogor Barat		unit				
Manajemen Konstruksi Wisma Atlet		paket			1	-
Manajemen Konstruksi Lapangan Tembak		paket			1	732.438.000
Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Kayumanis (BANKEU PROVINSI)		paket			2	297.991.409.214
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	%	#	100	100	55.105.056.000

Sub kegiatan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	laporan	4	4	2	1.150.000.000
Giat Olahraga Senam Masyarakat		laporan			1	150.000.000
Honor Instruktur						70.000.000
Honor Crew Senam						30.000.000
Air Mineral Senam						30.000.000
Belanja Seragam Senam						10.000.000
sepatu						10.000.000
HIBAH KORMI		laporan			1	1.000.000.000
Sub kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	dokumen	2	2	2	550.000.000
Giat Invitasi Olahraga Tradisional Tk.Kota Bogor:	dokumen				1	300.000.000
honor wasit Juri						40.000.000
honor panitia						6.000.000

pembelian alat Ortrad						15.000.000
Hadiah Perlombaan						112.500.000
mamin dan Snek						50.000.000
Seragam kegiatan						25.000.000
Bener/spanduk						8.000.000
sertifikat						6.000.000
Air Mineral						4.500.000
SPPD						33.000.000
Giat Invitasi Olahraga Tradisional Tk.Provinsi	dokumen				1	250.000.000
Honor atlit,pelatih dan panitia						85.000.000
Hotel						30.000.000
Sewa Mobil						10.000.000
Seragam Kontingen dan Seragam Tanding						50.000.000
Mamin Kegiatan Provinsi						75.000.000

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	unit	6		19	53.405.056.000
Revitalisasi Stadion Pajajaran		unit			1	40.000.000.000
JK. Perencanaan Stadion Pajajaran		Paket			1	3.020.000.000
JK. Pengawasan Stadion Pajajaran		Paket			1	1.750.000.000
Pemagaran dan Fasilitas Penunjang GOR Pajajaran		unit			1	2.500.000.000
JK. Perencanaan Stadion Pajajaran		dokumen			1	255.750.000
JK. Pengawasan Stadion Pajajaran		dokumen			1	161.750.000
JK. Perencanaan Gedung Indoor A		dokumen			1	100.000.000
JK. Pengawasan Gedung Indoor A		dokumen			1	100.000.000

Rehabilitasi Gedung Indoor A		unit			1	1.000.000.000
Pengadaan Barang Gedung Indoor A : Soundsystem (Tata Suara)		unit			1	100.000.000
Pengadaan Barang Gedung Indoor A : LED VIDEOTRON Indoor		unit			1	150.000.000
JK. Perencanaan Gedung Indoor B		dokumen			1	100.000.000
JK. Pengawasan Gedung Indoor B		dokumen			1	100.000.000
Rehabilitasi Gedung Indoor B		unit			1	1.000.000.000
Semi Indoor Basket		unit			1	100.000.000
JK. Perencanaan Semi Indoor Basket		dokumen			1	18.110.000
JK. Pengawasan Semi Indoor Basket		dokumen			1	10.590.000
Semi Indoor Volly		unit			1	100.000.000
JK. Perencanaan Semi Indoor Volly		dokumen			1	18.110.000

JK. Pengawasan Semi Indoor Volly		dokumen	
Lapangan Terbuka Luar		unit	
JK. Perencanaan Lapangan Terbuka Luar		dokumen	
JK. Pengawasan Lapangan Terbuka Luar		dokumen	
Kolam Renang Mila Kencana		unit	
JK. Perencanaan Kolam Renang Mila Kencana		dokumen	
JK. Pengawasan Kolam Renang Mila Kencana		dokumen	
Panjat Tebing		unit	
JK. Perencanaan Panjat Tebing		dokumen	
JK. Pengawasan Panjat Tebing		dokumen	
Wisma Atlet		unit	

1	10.590.000
1	150.000.000
1	27.165.000
1	15.885.000
1	200.000.000
1	36.220.000
1	21.180.000
1	100.000.000
1	18.110.000
1	10.590.000
1	150.000.000

JK. Perencanaan Wisma Atlet		dokumen	
JK. Pengawasan Wisma Atlet		dokumen	
Pemeliharaan Fisik Kawasan GOR Selatan		unit	
JK. Perencanaan Kawasan GOR Selatan		dokumen	
JK. Pengawasan Kawasan GOR Selatan		dokumen	
Pemeliharaan Fisik Kawasan GOR Utara		unit	
JK. Perencanaan Kawasan GOR Utara		dokumen	
JK. Pengawasan Kawasan GOR Utara		dokumen	
Kimia Kolam Renang Mila Kencana		paket	
Kimia Rumput Stadion Pajajaran		unit	
Pemeliharaan Rumput Stadion Pajajaran		unit	

1	27.165.000
1	15.885.000
1	300.000.000
1	52.482.000
1	30.906.000
1	300.000.000
1	52.482.000
1	30.906.000
1	350.000.000
1	182.200.000
1	190.000.000

Pemeliharaan Rumput Sintetis dan Lingkungan Kawasan GOR Selatan		paket			1	179.490.000
Pemeliharaan Rumput Sintetis dan Lingkungan Kawasan GOR Utara		paket			1	179.490.000
P O K I R		paket			-	0
M U S R E M B A N G Tenis meja		paket			4	40.000.000
Honorarium Pendampingan Kejaksaan/Tim/Tenaga Ahli		paket			2	150.000.000

Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	Kejuaraan	2	2	2	2.153.604.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	0	0

Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kab/Kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	Atlet	#	207	350	2.153.604.000
1. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)		Kegiatan	NA	NA	1	1.427.035.000
	Honorarium PP/PPK					6.270.000
	ATK					4.415.000
	Obat					23.324.000
	Perlengkapan Olahraga					285.336.000
	Minum					49.620.000
	Penginapan/Hotel					877.760.000
	Kendaraan					179.410.000
	Rapat					900.000

	Uang saku					216.000.000
2. Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)		Kegiatan	NA	NA	1	726.569.000
	ATK					4.415.000
	Perlengkapan Olahraga					110.964.000
	Minum					49.620.000
	Penginapan/Hotel					345.240.000
	Kendaraan					102.520.000
	Uang saku					84.000.000
	Rapat					900.000
	Perjalanan Dinas					28.910.000
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perolehan Medali tingkat Provinsi	Medali	#	74	50	30.588.325.000

Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang diseleksi	Atlet/Orang	#	250	300 orang	149.325.000
Seleksi Atlet menuju Pekan Olahraga Tingkat Daerah/Provinsi		Atlet/Orang	#		500 orang	149.325.000
	ATK					3.009.000
	Obat					6.668.000
	Perlengkapan Olahraga					34.788.000
	Minum					8.040.000
	Honor Wasit					49.500.000
	Honor Pelatih					21.600.000
	Rapat					780.000
	Makan Aktivitas Lapangan					12.600.000
	Perjalanan Dinas					12.340.000

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan	Atlet/Orang	#	300 orang		30.439.000.000
1. Pemusatan Latihan (Training Center) menuju Pekan Olahraga Tingkat Daerah/Provinsi		Orang	NA	300	350	150.000.000
	Honorarium PPTK					10.080.000
	Honorarium PP/PPK					2.090.000
	ATK					900.000
	Obat					6.668.000
	Perlengkapan Olahraga					52.232.000
	Minum					8.040.000
	Rapat					900.000
	Uang saku					56.700.000
	Perjalanan Dinas					12.390.000
2. Dana Cadangan PORPROV (ada di BKAD)						50.000.000.000
3. Hibah KONI Kota Bogor (Pelaksanaan PORPROV 2026)		Lembaga/Organisasi	1	1	1	29.989.000.000

4. Hibah NPCI Kota Bogor		Lembaga/Organisasi	1	1	1	300.000.000
Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Penghargaan	Orang	#	0		
Pemberian Penghargaan/Bonus Kepada Atlet dan Pelatih Berprestasi				0		
1. Penghargaan PORPROV						
	Emas Perorangan	Medali				
	Emas Berpasangan	Medali				
	Emas Beregu	Medali				
	Perak Perorangan	Medali				
	Perak Berpasangan	Medali				
	Perak Beregu	Medali				
	Perunggu Perorangan	Medali				
	Perunggu Berpasangan	Medali				

	Perunggu Beregu	Medali				
	Pelatih	Medali				
	Pajak Penghargaan					
Program Pengembangan Kapsitas daya saing Pemuda	persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	%	NA	NA	21,18	1.309.500.000
	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	%	NA	NA	4	
	Persentase pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan	%	NA	NA	2,175	
	Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional	%	NA	NA	30	

Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan	%	#	100	100	809.500.000
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	orang	#	20	30 orang	98.000.000
1. Uji Kopetensi dan Seleksi Pemuda Pelopor			#		30 orang	98.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						5.213.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						16.065.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						6.000.000
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan						7.500.000

Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Masyarakat						6.300.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota						41.922.000
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan						15.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	orang	#	80	300 orang	246.500.000
1. Seosialisasi dan Pengenalan Wira Usaha Muda Pemula			#		300 orang	246.500.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						25.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						15.000.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						60.000.000

Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						31.500.000
Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan						115.000.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi Kab/Kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tk. Kab/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	orang	#	100	800	65.000.000
1. Penyusunan RAD		Dokumen			1	65.000.000
2. Sosialisasi RAD		orang				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kab/Kota	Jumlah pemuda di tingkat kab/kota yang hak nya terpenuhi	orang			300	435.120.000

1.Sosialisasi dan Pengenalan Bahaya Narkoba dan HIV AIDS					300	105.690.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						9.448.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						42.241.500
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						22.500.000
Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						31.500.000
Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						-
2. Sosialisasi PELITA					100	-

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						-
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						-
Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						-
Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan						-
3. Sosialisasi Profile Kepemudaan						
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						
Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						
Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
4. Diklat Kepemimpinan					115	132.280.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						5.155.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						81.900.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						9.000.000

Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						36.225.000
Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						-
5. Peringatan Hari Sumpah Pemuda					1	96.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						4.553.200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						30.574.800
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						5.000.000
Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						10.500.000

Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						45.372.000
6, Workshop Pemuda Kreatif					150	101.150.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						5.525.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						55.125.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						9.000.000
Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						31.500.000
Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						-

Sub Kegiatan Penyediaan an pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan T.kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang terkelola dan termanfaatkan	unit	2		1	400.000.000
1. Pemeliharaan Gedung Serbaguna		unit			1	200.000.000
2. Pemeliharaan Panggung Terbuka		unit				200.000.000
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OKP yang terbina	okp	#	78	78	500.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis pemeguhan kemandirian ekonomi pemuda tk.kab/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	dokumen	1	1	1	500.000.000
1. Hibah DPD KNPI Kota Bogor		dokumen	1	1	1	500.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	%	#	100	100	990.000.000

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	%	#	100	100	990.000.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	laporan	1	1		
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		laporan	1	1		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan						
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota						
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota						
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan						
Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	organisasi	1	1	1	990.000.000

1. Hibah Kwarcab Pramuka Kota Bogor		organisasi	1	1	1	990.000.000
TOTAL						106.027.966.591

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2026	
					Target	Rp.
Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	point		24,67	27,34	17.374.317.290
	2 :Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	point		22,13	26,82	
	3 :Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	point		11,15	13	
	4 : Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	point		23,55	23,98	
	5 : persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%		100	100,00	
	6. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%		NA	100	

	7 : Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%		NA	94	
	8 : Persentase Kepatuhan Anggaran	%		NA	95	
	9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	%		96	97	
	10 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%		NA	100	
	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	point		88,13	89,25	
Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	point		89,25	89,75	
	2 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	point		90,00	90,75	
	3 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	point		89,30	89,75	
	4 : Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan	point		87,50	89,39	

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan pada Perangkat daerah	persen		100	100	90.000.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	4	4	5.000.000
1. Penyusunan dokumen renstra		dokumen				
2. penyusunan Renja Murni dan Renja Perubahan		dokumen		1	1	2.000.000
3. Penyusunan Dokumen LKPJ		dokumen		1	1	1.000.000
4. Penyusunan Dokumen Management Resiko Kinerja		dokumen		1	1	1.000.000
5. Penyusunan Dokumen LKIP		dokumen		1	1	1.000.000
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	NA	NA	10	85.000.000

Jasa Konsultansi Managemen : SP, SOP,dan SKM		paket	NA	NA	1	75.000.000
Cetak buku Laporan		buku	NA	NA		10.000.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%		98%	100%	11.087.187.930
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	#	46	56	11.087.187.930
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah		#	100	100	2.160.942.000
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	50.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		Paket	1	1	1	50.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	6	100.000.000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		Paket			1	2.370.000

Belanja Isi Tabung Gas 12 Kg		Paket			1	2.853.600
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Paket			1	43.379.900
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Paket			1	25.219.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		Paket			1	20.677.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		Paket			1	5.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	3	45.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		Paket			1	42.761.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		Paket			1	259.000
Belanja Natura dan Pakan-Natura		Paket			1	1.980.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	300.000.000
Belanja Natura dan Pakan-Natura		Paket			1	24.640.000

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		Paket			1	275.360.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	57.090.000
Penggandaan/Fotocopy		Paket			1	36.000.000
Belanja Cetak Spanduk		Paket			1	21.090.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang – undangan yang disediakan	dokumen	2	2	-	-
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	3	1.608.852.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Laporan			1	17.730.000
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		Laporan			1	290.995.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Laporan			1	1.300.127.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	%	#	100	100	1.035.846.200

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit	0	0	1	500.000.000
Belanja Modal Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4		unit			0	400.000.000
Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 3 (Motor Sampah)		unit			2	100.000.000
Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2		unit			5	225.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	#	29	46	385.033.200
Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan		unit				106.080.000
BM AC Standing Floor		unit				-
BM AC Split		unit			6	31.368.600
BM Personal Computer		unit			7	141.381.100
BM Printer Multifungsi		unit			2	12.804.000
BM Laptop		unit			4	43.045.200
BM Camera CCTV		unit				-
BM Camera Digital		unit				-
BM Smart TV		unit			1	20.000.000
BM Mesin Penghancur Kertas		unit				-
BM Drone Camera		unit			1	30.354.300
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	NA	NA	3	150.813.000

BM Filling Cabinet		Paket				36.383.000
BM Tempat Tidur Besi		Paket				-
BM Meja Kerja 1/2 biro		Paket				-
Karpet		Paket			1	30.000.000
BM Kursi Kerja Pejabat		Paket			1	54.430.000
BM Sofa Tamu		Paket			1	30.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	#	100	100	2.296.351.160
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	3	3	3	1.700.000.000
Belanja Tagihan Air		laporan			1	877.500.000
Belanja Tagihan Listrik Kantor dan Gedung Sarana Prasarana Olahraga		laporan			1	823.650.000
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		laporan			1	10.800.000

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	3	3	3	85.000.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		laporan			1	21.350.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		laporan			1	29.200.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		laporan			1	24.150.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	7	7	7	511.351.160
Belanja Jasa Tenaga Administrasi		laporan		693.990.755	1	83.200.000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		laporan		500.000.000	1	164.010.000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan		laporan			1	136.937.480
Belanja Jasa Tenaga Supir		laporan			1	71.000.000
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		laporan			1	30.108.000

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		laporan			1	1.198.080
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		laporan			1	1.497.600
Belanja Jaminan Hari Tua		laporan				23.400.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	%	#	100	100	703.990.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaeraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	2	2	3	183.990.000
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		unit			1	8.500.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II		unit			1	42.090.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		unit			1	133.400.000

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	unit	NA	NA	1	-
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa		unit				
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan		unit				
BM Pemeliharaan Gedung Kantor		unit				
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan		unit				
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	unit	NA	NA		520.000.000
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa						6.000.000
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan						30.000.000
Perbaikan halaman depan gedung						200.000.000
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan						24.000.000
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa						-
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan						-

BM Pengadaan Partisi Ruang dan Front Office Tahap I		unit				-
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan						-
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa						6.000.000
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan						30.000.000
BM Pengadaan Partisi Ruang dan Front Office Tahap II		unit			1	200.000.000
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan						24.000.000
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa						-
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan						-
BM Penataan Taman Kantor, Pos Satpam dan Papan nama Kantor Dispora		unit				-
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan						-
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Persentase pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional/Internasional	%	NA	50	50	155.836.680.026
	2. Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar	%	NA	NA	33	

	3. Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	%		74	55	
	4. Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	Persen		NA	55%	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan	%	#	100	100	1.300.000.007
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan Tk. Kab/Kota	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	lokasi	5	0	5	500.000.000
Pendataan Sentra Olahraga di Kota Bogor		lokasi			5	500.000.000

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	1	0	2	800.000.000
Sport Development Indeks (SDI)	Sport Development Indeks (SDI)	dokumen			1	300.000.000
	Belanja Atk, Cetak spanduk dan Foto Copy					22.000.000
	Belanja bahan kegiatan kantor kertas dan copier					4.000.000
	Belanja peralatan dan pendukung olahraga					64.000.000
	Belanja Snak rapat, jamuan tamu NasiBox dan Snak					57.000.000
	Honorarium tim kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan					20.900.000
	Belanja perjalanan dinas dalam kota/ pengganti transportasi					122.850.000
	Belanja modal alat kesehatan umum/ timbangan badan					5.000.000
	Air Mineral					4.250.000
Senam Bogor Berlari Edisi 2	dokumen				1	500.000.000

	Belanja Atk,Cetak spandukdan Foto Copy					20.000.000
	Buku panduan					7.500.000
	Dekorasi kegiatan					10.000.000
	Juri perlombaan					16.000.000
	Bahan jasa penyelenggara acara(Vidio Suting)					30.000.000
	hadiah Perlombaan					45.000.000
	Sank rapat dan jamuan tamu nasi bok, snak					25.000.000
	pelatihan senam seris 2 (ful bot)					200.000.000
	uang harian peserta					27.500.000
	sosialisasi senam seris 2, 6 kecamata kota bogor					119.000.000

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tk. Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	unit	2			
Reviu DED Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga Kecamatan Bogor Barat		unit			1	100.000.000
Manajemen Konstruksi Wisma Atlet		paket				
Manajemen Konstruksi Lapangan Tembak		paket				
Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Kayumanis (BANKEU PROVINSI)		paket				
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	%	#	100	100	2.200.000.019

Sub kegiatan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	laporan	4	4	2	1.650.000.000
Giat Olahraga Senam Masyarakat		laporan			1	150.000.000
Honor Instruktur						70.000.000
Honor Crew Senam						30.000.000
Air Mineral Senam						30.000.000
Belanja Seragam Senam						10.000.000
sepatu						10.000.000
HIBAH KORMI		laporan			1	1.500.000.000
Sub kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	dokumen	2	2	2	550.000.000
Giat Invitasi Olahraga Tradisional Tk.Kota Bogor:	dokumen					300.000.000
honor wasit Juri						40.000.000
honor panitia						6.000.000

pembelian alat Ortrad						15.000.000
Hadiah Perlombaan						112.500.000
mamin dan Snek						50.000.000
Seragam kegiatan						25.000.000
Bener/spanduk						8.000.000
sertifikat						6.000.000
Air Mineral						4.500.000
SPPD						33.000.000
Giat Invitasi Olahraga Tradisional Tk.Provinsi	dokumen					250.000.000
Honor atlit,pelatih dan panitia						85.000.000
Hotel						30.000.000
Sewa Mobil						10.000.000
Seragam Kontingen dan Seragam Tanding						50.000.000
Mamin Kegiatan Provinsi						75.000.000

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	unit	6		6	1.100.000.000
Revitalisasi Stadion Pajajaran		unit				
JK. Perencanaan Stadion Pajajaran		Paket				
JK. Pengawasan Stadion Pajajaran		Paket				
Pemagaran dan Fasilitas Penunjang GOR Pajajaran		unit				
JK. Perencanaan Stadion Pajajaran		dokumen				
JK. Pengawasan Stadion Pajajaran		dokumen				
JK. Perencanaan Gedung Indoor A		dokumen				
JK. Pengawasan Gedung Indoor A		dokumen				

Rehabilitasi Gedung Indoor A		unit				
Pengadaan Barang Gedung Indoor A : Soundsystem (Tata Suara)		unit				
Pengadaan Barang Gedung Indoor A : LED VIDEOTRON Indoor		unit				
JK. Perencanaan Gedung Indoor B		dokumen				
JK. PengawasanGedung Indoor B		dokumen				
Rehabilitasi Gedung Indoor B		unit				
Semi Indoor Basket		unit			-	0
JK. Perencanaan Semi Indoor Basket		dokumen				
JK. Pengawasan Semi Indoor Basket		dokumen				
Semi Indoor Volly		unit			-	0
JK. Perencanaan Semi Indoor Volly		dokumen				

JK. Pengawasan Semi Indoor Volly		dokumen	
Lapangan Terbuka Luar		unit	
JK. Perencanaan Lapangan Terbuka Luar		dokumen	
JK. Pengawasan Lapangan Terbuka Luar		dokumen	
Kolam Renang Mila Kencana		unit	
JK. Perencanaan Kolam Renang Mila Kencana		dokumen	
JK. Pengawasan Kolam Renang Mila Kencana		dokumen	
Panjat Tebing		unit	
JK. Perencanaan Panjat Tebing		dokumen	
JK. Pengawasan Panjat Tebing		dokumen	
Wisma Atlet		unit	

0	0
-	0
0	0

JK. Perencanaan Wisma Atlet		dokumen	
JK. Pengawasan Wisma Atlet		dokumen	
Pemeliharaan Fisik Kawasan GOR Selatan		unit	
JK. Perencanaan Kawasan GOR Selatan		dokumen	
JK. Pengawasan Kawasan GOR Selatan		dokumen	
Pemeliharaan Fisik Kawasan GOR Utara		unit	
JK. Perencanaan Kawasan GOR Utara		dokumen	
JK. Pengawasan Kawasan GOR Utara		dokumen	
Kimia Kolam Renang Mila Kencana		paket	
Kimia Rumput Stadion Pajajaran		unit	
Pemeliharaan Rumput Stadion Pajajaran		unit	

1	200.000.000
1	200.000.000
1	200.000.000
1	200.000.000
1	200.000.000

Pemeliharaan Rumput Sintetis dan Lingkungan Kawasan GOR Selatan		paket			0	
Pemeliharaan Rumput Sintetis dan Lingkungan Kawasan GOR Utara		paket			0	
P O K I R		paket			-	-
M U S R E M B A N G Tenis meja		paket			-	-
Honorarium Pendampingan Kejaksaan/Tim/Tenaga Ahli		paket			1	100.000.000

Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	Kejuaraan	2	2	2	2.047.654.800
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	0	0

Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kab/Kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	Atlet	#	207	350	2.047.654.800
1. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)		Kegiatan	NA	NA	1	1.321.085.800
	Honorarium PP/PPK					6.270.000
	ATK					4.415.000
	Obat					23.324.000
	Perlengkapan Olahraga					185.996.800
	Minum					49.620.000
	Penginapan/Hotel					723.360.000
	Kendaraan					186.400.000
	Rapat					900.000

	Uang saku					140.800.000
2. Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)		Kegiatan	NA	NA	1	726.569.000
	ATK					4.415.000
	Perlengkapan Olahraga					110.964.000
	Minum					49.620.000
	Penginapan/Hotel					345.240.000
	Kendaraan					102.520.000
	Uang saku					84.000.000
	Rapat					900.000
	Perjalanan Dinas					28.910.000
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perolehan Medali tingkat Provinsi	Medali	#	74	250	150.289.025.200

Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang diseleksi	Atlet/Orang	#	250	300 orang	149.325.000
Seleksi Atlet menuju Pekan Olahraga Tingkat Daerah/Provinsi		Atlet/Orang	#		300 orang	149.325.000
	ATK					3.009.000
	Obat					6.668.000
	Perlengkapan Olahraga					34.788.000
	Minum					8.040.000
	Honor Wasit					49.500.000
	Honor Pelatih					21.600.000
	Rapat					780.000
	Makan Aktivitas Lapangan					12.600.000
	Perjalanan Dinas					12.340.000

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan	Atlet/Orang	#	300 orang		111.134.975.200
1. Pemusatan Latihan (Training Center) menuju Pekan Olahraga Tingkat Daerah/Provinsi		Orang	NA	300	350	150.000.000
	Honorarium PPTK					10.080.000
	Honorarium PP/PPK					2.090.000
	ATK					900.000
	Obat					6.668.000
	Perlengkapan Olahraga					52.232.000
	Minum					8.040.000
	Rapat					900.000
	Uang saku					56.700.000
	Perjalanan Dinas					12.390.000
2. Dana Cadangan PORPROV (ada di BKAD)						0
3. Hibah KONI Kota Bogor (Pelaksanaan PORPROV 2026)		Lembaga/Organisasi	1	1	1	70.984.975.200

4. Hibah NPCI Kota Bogor		Lembaga/Organisasi	1	1	1	40.000.000.000
Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Penghargaan	Orang	#	0	825	39.004.725.000
Pemberian Penghargaan/Bonus Kepada Atlet dan Pelatih Berprestasi				0	825	39.004.725.000
1. Penghargaan PORPROV					825	39.004.725.000
	Emas Perorangan	Medali			141	14.100.000.000
	Emas Berpasangan	Medali			80	4.920.000.000
	Emas Beregu	Medali			73	2.343.000.000
	Perak Perorangan	Medali			65	2.178.000.000
	Perak Berpasangan	Medali			53	1.060.000.000
	Perak Beregu	Medali			80	1.080.000.000
	Perunggu Perorangan	Medali			58	783.000.000
	Perunggu Berpasangan	Medali			60	600.000.000

	Perunggu Beregu	Medali			80	560.000.000
	Pelatih	Medali			135	10.125.000.000
	Pajak Penghargaan					1.255.725.000
Program Pengembangan Kapsitas daya saing Pemuda	persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	%	NA	NA	22	1.860.000.000
	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	%	NA	NA	4	
	Persentase pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan	%	NA	NA	2,18	
	Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional	%	NA	NA	35	

Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan	%	#	100	100	1.360.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	orang	#	20	30 orang	-
1. Uji Kopetensi dan Seleksi Pemuda Pelopor			#		30 orang	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						-
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						-
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan						-

Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Masyarakat						-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota						-
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan						-
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	orang	#	80	600 orang	60.000.000
1. Seosialisasi dan Pengenalan Wira Usaha Muda Pemula			#		600 orang	60.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						-
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						60.000.000

Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						-
Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan						
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi Kab/Kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tk. Kab/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	orang	#	100	800	1.300.000.000
1. Penyusunan RAD		Dokumen				
2. Sosialisasi RAD		orang			150	150.000.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kab/Kota	Jumlah pemuda di tingkat kab/kota yang hak nya terpenuhi	orang				

1.Sosialisasi dan Pengenalan Bahaya Narkoba dan HIV AIDS					300	250.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						16.448.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						42.241.500
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						22.500.000
Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						31.500.000
Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						137.310.000
2. Sosialisasi PELITA					100	100.000.000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						8.553.200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						30.574.800
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						5.000.000
Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						10.500.000
Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan						45.372.000
3. Sosialisasi Profile Kepemudaan					100	100.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						8.553.200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						30.574.800

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						5.000.000
Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						10.500.000
Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						45.372.000
4. Diklat Kepemimpinan					115	350.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						9.155.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						81.900.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						9.000.000

Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						36.225.000
Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						213.720.000
5. Peringatan Hari Sumpah Pemuda					1	100.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						8.553.200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						30.574.800
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						5.000.000
Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						10.500.000

Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						45.372.000
6, Workshop Pemuda Kreatif					150	250.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						10.525.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						55.125.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						9.000.000
Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah						31.500.000
Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						143.850.000

Sub Kegiatan Penyediaan an pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan T.kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang terkelola dan termanfaatkan	unit	2		1	-
1. Pemeliharaan Gedung Serbaguna		unit				
2. Pemeliharaan Panggung Terbuka		unit			1	-
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OKP yang terbina	okp	#	78	78	500.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis pemeguhan kemandirian ekonomi pemuda tk.kab/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	dokumen	1	1	2	500.000.000
1. Hibah DPD KNPI Kota Bogor		dokumen	1	1	2	500.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	%	#	100	100	1.240.000.000

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	%	#	100	100	1.240.000.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	laporan	1	1	1	250.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		laporan	1	1	1	250.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						7.234.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga						14.751.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						4.500.000
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan						6.750.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota						180.840.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota						29.925.000
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan						6.000.000
Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	organisasi	1	1	1	990.000.000

1. Hibah Kwarcab Pramuka Kota Bogor		organisasi	1	1	1	990.000.000
TOTAL						174.450.997.316

Program-program pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor adalah program yang dilaksanakan sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis) Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor 2025-2026 yang mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor 2025-2026. , diantaranya :

A. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Dalam Program ini terdapat 4 (empat) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub. Kegiatan yang mendukung Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga, diantaranya:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan sub.kegiatan:

- a. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan sub.kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Dengan sub.kegiatan:

- a. Seleksi Atlet Daerah
- b. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
- c. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Dengan sub.kegiatan:

- a. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
- b. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
- c. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda

Dalam Program ini terdapat 2 (dua) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub. Kegiatan yang mendukung Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga, diantaranya:

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Dengan sub.kegiatan:
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - d. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Dengan sub.kegiatan:
 - a. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota

C. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Dalam Program ini terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub. Kegiatan yang mendukung Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga, diantaranya:

1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Dengan sub.kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
 - b. Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Program ini terdapat 6 (enam) Kegiatan dan 2 (dua) Sub. Kegiatan yang mendukung Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga, diantaranya:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dengan sub.kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dengan sub.kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Dengan sub.kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Dengan sub.kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pengadaan Mebel.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan sub.kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub.kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.

6.3 Pendanaan

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan pelayanan keolahragaan dan kepemudaan, khususnya dalam hal pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Kota Bogor dan Pendanaan lainnya seperti Pengajuan Bankeu dari Provinsi Jawa Barat untuk Pembangunan Wisma Atlet dan Lapangan Tembak yang berlokasi di Kelurahan Kayumanis kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor untuk mendukung juga Pelaksanaan Acara PorProv 2026 Dimana Kota Bogor menjadi Tuan Rumah acara tersebut. Dalam rangka pencapaian target pembangunan Kota Bogor tahun 2025-2026, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor telah Menyusun Matriks Rencana Strategis 2025-2026 mulai dari Tujuan, Sasaran, Program samapai Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang berisikan Pendanaan dan indikator kinerja, sebagai berikut:

TC. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan			1. PREDIKAT SAKIP DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH	predikat	A	A	13.861.043.591	A	17.374.317.290	A	18.433.905.130
			2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH	point	3,52	3,55		3,57		3,57	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		1. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	nilai indeks	81,5	83,20	13.861.043.591	83,30	17.374.317.290	66	18.433.905.130
			2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	NA	91%		92%		92%	
			3. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	%	NA	95%		95%		95%	
			4. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 70)	inovasi	NA	≥ 1 Inovasi/tahun/PD		≥ 1 Inovasi/tahun/PD		≥ 1 Inovasi/tahun/PD	
		Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	point	24,67	27,01	13.861.043.591	27,34	17.374.317.290	27,34	18.433.905.130
			2 :Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	point	22,13	26,55		26,82		26,82	
			3 :Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	point	11,15	12,48		13		13	
			4 : Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	point	23,55	23,75		23,98		23,98	
			5 : persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%	100	100		100,00		100	
			6. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	NA	100		100		100	
			7 : Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	NA	94		94		94	
			8 : Persentase Kepatuhan Anggaran	%	NA	95		95		95	
			9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	%	96	97		97		97	
			10 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	NA	100		100		94	

	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	point	88,13	88,75		89,25		89,25	
		Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	point	89,25	89,50		89,75		89,75	
			2 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	point	90,00	90,50		90,75		90,75	
			3 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	point	89,30	89,50		89,75		89,75	
			4 : Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan	point	87,50	88,38		89,39		89,39	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan pada Perangkat daerah	persen	100	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	5	5.000.000	4	5.000.000	17	5.000.000
		1. Penyusunan dokumen renstra		dokumen		1	1.000.000			1	
		2. penyusunan Renja Murni dan Renja Perubahan		dokumen	1	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
		3. Penyusunan Dokumen LKPJ		dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
		4. Penyusunan Dokumen Management Resiko Kinerja		dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
		5. Penyusunan Dokumen LKIP		dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000

		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	NA	10	85.000.000	10	85.000.000	10	85.000.000
		Jasa Konsultansi Managemen : SP, SOP,dan SKM		paket	NA	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
		Cetak buku Laporan		buku	NA	25	10.000.000		10.000.000		10.000.000
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%	98%	100%	8.738.413.866	100%	11.087.187.930	100%	11.087.187.930
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	46	52	8.738.413.866	56	11.087.187.930	56	11.087.187.930
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah		100	100	1.051.989.000	100	2.160.942.000	100	2.160.942.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		Paket	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	6	80.480.900	6	100.000.000	6	100.000.000
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		Paket		1	2.370.000	1	2.370.000	1	2.370.000
		Belanja Isi Tabung Gas 12 Kg		Paket		1	2.853.600	1	2.853.600	1	2.853.600
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Paket		1	34.560.800	1	43.379.900	1	43.379.900
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Paket		1	20.219.000	1	25.219.000	1	25.219.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		Paket		1	15.677.500	1	20.677.500	1	20.677.500
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		Paket		1	4.800.000	1	5.500.000	1	5.500.000

		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3	40.250.500	3	45.000.000	3	45.000.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		Paket		1	38.246.500	1	42.761.000	1	42.761.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor		Paket		1	222.000	1	259.000	1	259.000
		Belanja Natura dan Pakan-Natura		Paket		1	1.782.000	1	1.980.000	1	1.980.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	250.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000
		Belanja Natura dan Pakan-Natura		Paket		1	21.560.000	1	24.640.000	1	24.640.000
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		Paket		1	228.440.000	1	275.360.000	1	275.360.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	50.527.600	2	57.090.000	2	57.090.000
		Penggandaan/Fotocopy		Paket		1	30.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000
		Belanja Cetak Spanduk		Paket		1	20.527.600	1	21.090.000	1	21.090.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang – undangan yang disediakan	dokumen	2	-	-	-	-	-	-
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	3	590.730.000	3	1.608.852.000	3	1.608.852.000
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Laporan		1	15.730.000	1	17.730.000	1	17.730.000
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		Laporan		1	75.000.000	1	290.995.000	1	290.995.000
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Laporan		1	500.000.000	1	1.300.127.000	1	1.300.127.000

		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBM D	%	100	100	706.151.700	100	1.035.846.200	100	1.326.785.200
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit	0	1	100.000.000	1	500.000.000	6	500.000.000
		Belanja Modal Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4		unit		0	-	0	400.000.000	2	400.000.000
		Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 3 (Motor Samnab)		unit		2	100.000.000	2	100.000.000	4	100.000.000
		Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2		unit		2	90.000.000	5	225.000.000	10	225.000.000
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	29	44	478.240.700	46	385.033.200	0	584.444.200
		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan		unit			106.080.000		106.080.000		106.080.000
		BM AC Standing Floor		unit		4	116.086.800		-		116.086.800
		BM AC Split		unit		6	31.368.600	6	31.368.600		31.368.600
		BM Personal Computer		unit		7	141.381.100	7	141.381.100		141.381.100
		BM Printer Multifungsi		unit			-	2	12.804.000		12.804.000
		BM Laptop		unit			-	4	43.045.200		43.045.200
		BM Camera CCTV		unit		14	37.976.400		-		37.976.400
		BM Camera Digital		unit		2	32.147.800		-		32.147.800
		BM Smart TV		unit			-	1	20.000.000		20.000.000
		BM mesin Penghancur Kertas		unit		4	13.200.000		-		13.200.000
		BM Drone Camera		unit			-	1	30.354.300		30.354.300
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	NA	3	127.911.000	3	150.813.000	6	242.341.000
		BM Filling Cabinet		Paket		1	36.383.000		36.383.000	1	36.383.000
		BM Tempat Tidur Besi		Paket		1	79.010.000		-	1	79.010.000
		BM Meja Kerja 1/2 biro		Paket		1	12.518.000		-	1	12.518.000
		Karpet		Paket			-	1	30.000.000	1	30.000.000
		BM Kursi Kerja Pejabat		Paket			-	1	54.430.000	1	54.430.000
		BM Sofa Tamu		Paket			-	1	30.000.000	1	30.000.000

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2.310.499.025	100	2.296.351.160	100	2.285.000.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	3	3	1.541.068.545	3	1.700.000.000	3	1.700.000.000
		Belanja Tagihan Air		laporan		1	742.500.000	1	877.500.000	1	877.500.000
		Belanja Tagihan Listrik Kantor dan Gedung Sarana Prasarana Olahraga		laporan		1	794.750.000	1	823.650.000	1	823.650.000
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan		laporan		1	10.800.000	1	10.800.000	1	10.800.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	3	3	80.900.000	3	85.000.000	3	85.000.000
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		laporan		1	18.300.000	1	21.350.000	1	21.350.000
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		laporan		1	21.900.000	1	29.200.000	1	29.200.000
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		laporan		1	20.700.000	1	24.150.000	1	24.150.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	7	7	688.530.480	7	511.351.160	10	500.000.000
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi		laporan	693.990.755	1	83.200.000	1	83.200.000	1	83.200.000
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		laporan	500.000.000	1	164.010.000	1	164.010.000	1	164.010.000
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan		laporan		1	292.500.000	1	136.937.480	1	355.000.000
		Belanja Jasa Tenaga Supir		laporan		1	71.000.000	1	71.000.000	1	71.000.000
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		laporan		1	41.688.000	1	30.108.000	1	42.316.800

		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		laporan		1	1.658.880	1	1.198.080	1	1.127.520
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		laporan		1	2.073.600	1	1.497.600	1	1.408.200
		Belanja Jaminan Hari Tua		laporan			32.400.000		23.400.000		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	%	100	100	963.990.000	100	703.990.000	100	1.483.990.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	2	3	183.990.000	3	183.990.000	3	183.990.000
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		unit		1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II		unit		1	42.090.000	1	42.090.000	1	42.090.000
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		unit		1	133.400.000	1	133.400.000	1	133.400.000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	unit	NA	1	260.000.000	1	-	1	260.000.000
		Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa		unit			6.000.000				6.000.000
		Belanja Jasa Konsultan Perencanaan		unit			30.000.000				30.000.000
		BM Pemeliharaan Gedung Kantor		unit			200.000.000				200.000.000
		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan		unit			24.000.000				24.000.000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	unit	NA	2	520.000.000		520.000.000	3	1.040.000.000
		Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					-		6.000.000		6.000.000
		Belanja Jasa Konsultan Perencanaan					-		30.000.000		30.000.000
		Perbaikan halaman depan gedung					-		200.000.000		200.000.000

		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan					-		24.000.000		24.000.000
		Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					6.000.000		-		6.000.000
		Belanja Jasa Konsultan Perencanaan					30.000.000		-		30.000.000
		BM Pengadaan Partisi Ruangan dan Front Office Tahap I		unit		1	200.000.000		-	1	200.000.000
		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan					24.000.000		-		24.000.000
		Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					-		6.000.000		6.000.000
		Belanja Jasa Konsultan Perencanaan					-		30.000.000		30.000.000
		BM Pengadaan Partisi Ruangan dan Front Office Tahap II		unit			-	1	200.000.000	1	200.000.000
		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan					-		24.000.000		24.000.000
		Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					6.000.000		-		6.000.000
		Belanja Jasa Konsultan Perencanaan					30.000.000		-		30.000.000
		BM Penataan Taman Kantor, Pos Satpam dan Papan nama Kantor Dispora		unit		1	200.000.000		-	1	200.000.000
		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan					24.000.000		-		24.000.000
Terwujudnya Pembudayaan Olah raga pada Masyarakat			Indeks Pembangunan Olahraga/SDI	indeks	NA	0,274	89.867.423.000	0,274	155.836.680.026	0,274	163.324.098.318
	Meningkatnya pembudayaan Olah raga dan peningkatan kapasitas serta daya saing olahraga		1. Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO)	%	57,3	59	89.867.423.000	60	155.836.680.026	60	163.324.098.318
			2. Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi	%	NA	10		50		50	

		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Persentase pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional/Internasional	%	50	50	89.867.423.000	50	155.836.680.026	50	163.324.098.318
			2. Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar	%	NA	80		33		100	
			3. Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	%	74	50		55		55	
			4. Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	Persen	NA	50%		55%		55%	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan	%	100	100	2.020.438.000	100	1.300.000.007	100	3.117.162.318
		Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan Tk. Kab/Kota	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	lokasi	0	5	500.000.000	5	500.000.000	1	500.000.000
		Pendataan Sentra Olahraga di Kota Bogor		lokasi		5	500.000.000	5	500.000.000	1	500.000.000

		Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	0	2	788.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000
		Sport Development Indeks (SDI)	Sport Development Indeks (SDI)	dokumen		1	288.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
			Belanja Atk,Cetak spandukdan Foto Copy				10.000.000		22.000.000		22.000.000
			Belanja bahan kegiatan kantor kertas dan coper				4.000.000		4.000.000		4.000.000
			Belanja peralatan dan pendukung olahraga				64.000.000		64.000.000		64.000.000
			Belanja Snak rapat,jamuan tamu NasiBox dan Snak				57.000.000		57.000.000		57.000.000
			Honorarium tim kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan				20.900.000		20.900.000		20.900.000
			Belanja perjalanan dinas dalam kota/pengganti tranport				122.850.000		122.850.000		122.850.000
			Belanja modal alat kesehatan umum/timbangan badan				5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Air Mineral				4.250.000		4.250.000		4.250.000
		Senam Bogor Berlari Edisi 2	dokumen			1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
			Belanja Atk,Cetak spandukdan Foto Copy				10.000.000		20.000.000		20.000.000
			Buku panduan				7.500.000		7.500.000		7.500.000
			Dekorasi kegiatan				10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Juri perlombaan				16.000.000		16.000.000		16.000.000
			Bahan jasa penyelenggara acara(Vidio Suting)				30.000.000		30.000.000		30.000.000
			hadiah Perlombaan				45.000.000		45.000.000		45.000.000
			Sank rapat dan jamuan tamu nasi bok, snak				25.000.000		25.000.000		25.000.000
			pelatihan senam series 2 (ful bot)				-		200.000.000		200.000.000
			uang harian peserta				27.500.000		27.500.000		27.500.000
			sosialisasi senam series 2, 6 kecamatan kota bogor				119.000.000		119.000.000		119.000.000

		Sub kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	dokumen	2	2	550.000.000	2	550.000.000	2	550.000.000
		Giat Invitasi Olahraga Tradisional Tk.Kota Bogor:	dokumen			1	300.000.000		300.000.000		300.000.000
		honor wasit Juri					40.000.000		40.000.000		40.000.000
		honor panitia					6.000.000		6.000.000		6.000.000
		pembelian alat Ortrad					15.000.000		15.000.000		15.000.000
		Hadiah Perlombaan					112.500.000		112.500.000		112.500.000
		mamin dan Snek					50.000.000		50.000.000		50.000.000
		Seragam kegiatan					25.000.000		25.000.000		25.000.000
		Bener/spanduk					8.000.000		8.000.000		8.000.000
		sertifikat					6.000.000		6.000.000		6.000.000
		Air Mineral					4.500.000		4.500.000		4.500.000
		SPPD					33.000.000		33.000.000		33.000.000
		Giat Invitasi Olahraga Tradisional Tk.Provinsi	dokumen			1	250.000.000		250.000.000		250.000.000
		Honor atlit,pelatih dan panitia					85.000.000		85.000.000		85.000.000
		Hotel					30.000.000		30.000.000		30.000.000
		Sewa Mobil					10.000.000		10.000.000		10.000.000
		Seragam Kontingen dan Seragam Tanding					50.000.000		50.000.000		50.000.000
		Mamin Kegiatan Provinsi					75.000.000		75.000.000		75.000.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	unit		19	53.405.056.000	6	1.100.000.000	19	5.670.256.000
		Revitalisasi Stadion Pajajaran		unit		1	40.000.000.000				
		JK. Perencanaan Stadion Pajajaran		Paket		1	3.020.000.000				
		JK. Pengawasan Stadion Pajajaran		Paket		1	1.750.000.000				
		Pemagaran dan Fasilitas Penunjang GOR Pajajaran		unit		1	2.500.000.000			1	2.500.000.000

		JK. Perencanaan Stadion Pajajaran		dokumen		1	255.750.000			1	255.750.000
		JK. Pengawasan Stadion Pajajaran		dokumen		1	161.750.000			1	161.750.000
		JK. Perencanaan Gedung Indoor A		dokumen		1	100.000.000			1	18.110.000
		JK. PengawasanGedung Indoor A		dokumen		1	100.000.000			1	10.590.000
		Rehabilitasi Gedung Indoor A		unit		1	1.000.000.000				
		Pengadaan Barang Gedung Indoor A : Soundsystem (Tata Suara)		unit		1	100.000.000				
		Pengadaan Barang Gedung Indoor A : LED VIDEOTRON Indoor		unit		1	150.000.000				
		JK. Perencanaan Gedung Indoor B		dokumen		1	100.000.000			1	18.110.000
		JK. PengawasanGedung Indoor B		dokumen		1	100.000.000			1	10.590.000
		Rehabilitasi Gedung Indoor B		unit		1	1.000.000.000				
		Semi Indoor Basket		unit		1	100.000.000	-	0	1	100.000.000
		JK. Perencanaan Semi Indoor Basket		dokumen		1	18.110.000			1	18.110.000
		JK. Pengawasan Semi Indoor Basket		dokumen		1	10.590.000			1	10.590.000
		Semi Indoor Volly		unit		1	100.000.000	-	0	1	100.000.000
		JK. Perencanaan Semi Indoor Volly		dokumen		1	18.110.000			1	18.110.000
		JK. Pengawasan Semi Indoor Volly		dokumen		1	10.590.000			1	10.590.000
		Lapangan Terbuka Luar		unit		1	150.000.000	0	0	1	150.000.000
		JK. Perencanaan Lapangan Terbuka Luar		dokumen		1	27.165.000			1	27.165.000
		JK. Pengawasan Lapangan Terbuka Luar		dokumen		1	15.885.000			1	15.885.000
		Kolam Renang Mila Kencana		unit		1	200.000.000	-	0	1	200.000.000
		JK. Perencanaan Kolam Renang Mila Kencana		dokumen		1	36.220.000			1	36.220.000
		JK. Pengawasan Kolam Renang Mila Kencana		dokumen		1	21.180.000			1	21.180.000
		Panjat Tebing		unit		1	100.000.000	0	0	1	100.000.000
		JK. PerencanaanPanjat Tebing		dokumen		1	18.110.000			1	18.110.000
		JK. Pengawasan Panjat Tebing		dokumen		1	10.590.000			1	10.590.000

		Wisma Atlet		unit		1	150.000.000			1	150.000.000
		JK. Perencanaan Wisma Atlet		dokumen		1	27.165.000			1	27.165.000
		JK. Pengawasan Wisma Atlet		dokumen		1	15.885.000			1	15.885.000
		Pemeliharaan Fisik Kawasan GOR Selatan		unit		1	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
		JK. Perencanaan Kawasan GOR Selatan		dokumen		1	52.482.000			1	52.482.000
		JK. Pengawasan Kawasan GOR Selatan		dokumen		1	30.906.000			1	30.906.000
		Pemeliharaan Fisik Kawasan GOR Utara		unit		1	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
		JK. Perencanaan Kawasan GOR Utara		dokumen		1	52.482.000			1	52.482.000
		JK. Pengawasan Kawasan GOR Utara		dokumen		1	30.906.000			1	30.906.000
		Kimia Kolam Renang Mila Kencana		paket		1	350.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
		Kimia Rumput Stadion Pajajaran		unit		1	182.200.000	1	200.000.000	1	200.000.000
		Pemeliharaan Rumput Stadion Pajajaran		unit		1	190.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
		Pemeliharaan Rumput Sintetis dan Lingkungan Kawasan GOR Selatan		paket		1	179.490.000	0		1	179.490.000
		Pemeliharaan Rumput Sintetis dan Lingkungan Kawasan GOR Utara		paket		1	179.490.000	0		1	179.490.000
		P O K I R		paket		-	0	-	-		
		M U S R E M B A N G Tenis meja		paket		4	40.000.000	-	-	4	40.000.000
		Honorarium Pendampingan Kejaksaan/Tim/Tenaga Ahli		paket		2	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	Kejuaraan	2	2	2.153.604.000	2	2.047.654.800		2.047.654.800
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0
		Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kab/Kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	Atlet	207	350	2.153.604.000	350	2.047.654.800	350	2.047.654.800
		1. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)		Kegiatan	NA	1	1.427.035.000	1	1.321.085.800	1	1.321.085.800
			Honorarium PP/PPK				6.270.000		6.270.000		6.270.000
			ATK				4.415.000		4.415.000		4.415.000
			Obat				23.324.000		23.324.000		23.324.000
			Perlengkapan Olahraga				285.336.000		185.996.800		185.996.800
			Minum				49.620.000		49.620.000		49.620.000
			Penginapan/Hotel				877.760.000		723.360.000		723.360.000
			Kendaraan				179.410.000		186.400.000		186.400.000
			Rapat				900.000		900.000		900.000
			Uang saku				216.000.000		140.800.000		140.800.000

		2. Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)		Kegiatan	NA	1	726.569.000	1	726.569.000	1	726.569.000
			ATK				4.415.000		4.415.000		4.415.000
			Perlengkapan Olahraga				110.964.000		110.964.000		110.964.000
			Minum				49.620.000		49.620.000		49.620.000
			Penginapan/Hotel				345.240.000		345.240.000		345.240.000
			Kendaraan				102.520.000		102.520.000		102.520.000
			Uang saku				84.000.000		84.000.000		84.000.000
			Rapat				900.000		900.000		900.000
			Perjalanan Dinas				28.910.000		28.910.000		28.910.000
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perolehan Medali tingkat Provinsi	Medali	74	50	30.588.325.000	250	150.289.025.200	250	150.289.025.200
		Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang diseleksi	Atlet/Orang	250	300 orang	149.325.000	300 orang	149.325.000	300 orang	149.325.000
		Seleksi Atlet menuju Pekan Olahraga Tingkat Daerah/Provinsi		Atlet/Orang		500 orang	149.325.000	300 orang	149.325.000	300 orang	149.325.000
			ATK				3.009.000		3.009.000		3.009.000
			Obat				6.668.000		6.668.000		6.668.000
			Perlengkapan Olahraga				34.788.000		34.788.000		34.788.000
			Minum				8.040.000		8.040.000		8.040.000
			Honor Wasit				49.500.000		49.500.000		49.500.000
			Honor Pelatih				21.600.000		21.600.000		21.600.000
			Rapat				780.000		780.000		780.000
			Makan Aktivitas Lapangan				12.600.000		12.600.000		12.600.000
			Perjalanan Dinas				12.340.000		12.340.000		12.340.000

		1. Pemusatan Latihan (Training Center) menuju Pekan Olahraga Tingkat Daerah/Provinsi		Orang	300	350	150.000.000	350	150.000.000	350	150.000.000
			Honorarium PPTK				10.080.000		10.080.000		10.080.000
			Honorarium PP/PPK				2.090.000		2.090.000		2.090.000
			ATK				900.000		900.000		900.000
			Obat				6.668.000		6.668.000		6.668.000
			Perlengkapan Olahraga				52.232.000		52.232.000		52.232.000
			Minum				8.040.000		8.040.000		8.040.000
			Rapat				900.000		900.000		900.000
			Uang saku				56.700.000		56.700.000		56.700.000
			Perjalanan Dinas				12.390.000		12.390.000		12.390.000
		2. Dana Cadangan PORPROV (ada di BKAD)					50.000.000.000		0		100.000.000.000
		3. Hibah KONI Kota Bogor (Pelaksanaan PORPROV 2026)		Lembaga/Organis asi	1	1	29.989.000.000	1	70.984.975.200	1	70.984.975.200
		4. Hibah NPCI Kota Bogor		Lembaga/Organis asi	1	1	300.000.000	1	40.000.000.000	1	40.000.000.000
		Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Penghargaan	Orang	0			825	39.004.725.000	825	39.004.725.000
		Pemberian Penghargaan/Bonus Kepada Atlet dan Pelatih Berprestasi			0			825	39.004.725.000	825	39.004.725.000
		1. Penghargaan PORPROV						825	39.004.725.000	825	39.004.725.000
			Emas Perorangan	Medali				141	14.100.000.000	141	14.100.000.000
			Emas Berpasangan	Medali				80	4.920.000.000	80	4.920.000.000
			Emas Beregu	Medali				73	2.343.000.000	73	2.343.000.000
			Perak Perorangan	Medali				65	2.178.000.000	65	2.178.000.000
			Perak Berpasangan	Medali				53	1.060.000.000	53	1.060.000.000
			Perak Beregu	Medali				80	1.080.000.000	80	1.080.000.000
			Perunggu Perorangan	Medali				58	783.000.000	58	783.000.000
			Perunggu Berpasangan	Medali				60	600.000.000	60	600.000.000
			Perunggu Beregu	Medali				80	560.000.000	80	560.000.000
			Pelatih	Medali				135	10.125.000.000	135	10.125.000.000
			Pajak Penghargaan						1.255.725.000		1.255.725.000

Terwujudnya Pemuda yang cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan			Persentase Pemuda yang berprestasi di Kota Bogor	%	NA	0,0002	2.299.500.000	0,0003	3.341.000.000	0,0003	3.955.500.000
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing pemuda		1. Persentase peningkatan wirausaha muda baru	%	NA	1,8	2.299.500.000	2,1	3.341.000.000		3.955.500.000
			2. Persentase Pemuda yang berprestasi di Kota Bogor	%	NA	0,0002		0,0003			
		Program Pengembangan Kapsitas daya saing Pemuda	persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	%	NA	21,18	1.309.500.000	22	2.101.000.000	21	2.715.500.000
			Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	%	NA	4		4		4	
			Persentase pemuda yang medapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan	%	NA	2,175		2,18		2,173	
			Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional	%	NA	30		35		30	
		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan	%	100	100	809.500.000	100	1.601.000.000	100	2.215.500.000
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	orang	20	30 orang	98.000.000	30 orang	98.000.000	30 orang	98.000.000,00
		1. Uji Kopetensi dan Seleksi Pemuda Pelopor				30 orang	98.000.000	30 orang	98.000.000	30 orang	98.000.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.213.000		5.213.000		5.213.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					16.065.000		16.065.000		16.065.000,00
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.000.000		6.000.000		6.000.000,00
		Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					7.500.000		7.500.000		7.500.000,00

		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Masyarakat					6.300.000		6.300.000		6.300.000,00
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					41.922.000		41.922.000		41.922.000,00
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					15.000.000		15.000.000		15.000.000,00
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	orang	80	300 orang	246.500.000	600 orang	203.000.000	600 orang	318.000.000
		1. Seosialisasi dan Pengenalan Wira Usaha Muda Pemula				300 orang	246.500.000	600 orang	203.000.000	600 orang	318.000.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					25.000.000		50.000.000		50.000.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					15.000.000		30.000.000	50.000	30.000.000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					60.000.000		60.000.000		60.000.000
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah					31.500.000		63.000.000		63.000.000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan					115.000.000				115.000.000
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi Kab/Kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tk. Kab/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	orang	100	800	65.000.000	800	1.300.000.000	800	1.399.500.000
		1. Penyusunan RAD		Dokumen		1	65.000.000			1	99.500.000
		2. Sosialisasi RAD		orang				150	150.000.000	1	150.000.000

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kab/Kota	Jumlah pemuda di tingkat kan/kota yang hak nya terpenuhi	orang		300	435.120.000				
		1.Sosialisasi dan Pengenalan Bahaya Narkoba dan HIV AIDS				300	105.690.000	300	250.000.000	300	250.000.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.448.500		16.448.500		16.448.500
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					42.241.500		42.241.500		42.241.500
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					22.500.000		22.500.000		22.500.000
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah					31.500.000		31.500.000		31.500.000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-		137.310.000		137.310.000
		2. Sosialisasi PELITA				100	-	100	100.000.000	100	100.000.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					-		8.553.200		8.553.200
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					-		30.574.800		30.574.800
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					-		5.000.000		5.000.000
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah					-		10.500.000		10.500.000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan					-		45.372.000		45.372.000

		3. Sosialisasi Profile Kepemudaan						100	100.000.000	100	100.000.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							8.553.200		8.553.200
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga							30.574.800		30.574.800
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							5.000.000		5.000.000
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah							10.500.000		10.500.000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							45.372.000		45.372.000
		4. Diklat Kepemimpinan				115	132.280.000	115	350.000.000	115	350.000.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.155.000		9.155.000		9.155.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					81.900.000		81.900.000		81.900.000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					9.000.000		9.000.000		9.000.000
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah					36.225.000		36.225.000		36.225.000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-		213.720.000		213.720.000

		5. Peringatan Hari Sumpah Pemuda				1	96.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.553.200		8.553.200		8.553.200
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					30.574.800		30.574.800		30.574.800
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.000.000		5.000.000		5.000.000
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah					10.500.000		10.500.000		10.500.000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45.372.000		45.372.000		45.372.000
		6, Workshop Pemuda Kreatif				150	101.150.000	150	250.000.000	150	250.000.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.525.000		10.525.000		10.525.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					55.125.000		55.125.000		55.125.000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					9.000.000		9.000.000		9.000.000
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah					31.500.000		31.500.000		31.500.000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-		143.850.000		143.850.000

		Sub Kegiatan Penyediaan an pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan T.kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang terkelola dan termanfaatkan	unit		1	400.000.000	1	-	2	400.000.000
		1. Pemeliharaan Gedung Serbaguna		unit		1	200.000.000			1	200.000.000
		2. Pemeliharaan Panggung Terbuka		unit			200.000.000	1	-	1	200.000.000
		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OKP yang terbina	okp	78	78	500.000.000	78	500.000.000	2	500.000.000
		Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis pemeguhan kemandirian ekonomi pemuda tk.kab/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	dokumen	1	1	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000
		1. Hibah DPD KNPI Kota Bogor		dokumen	1	1	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	%	100	100	990.000.000	100	1.240.000.000	100	1.240.000.000
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	%	100	100	990.000.000	100	1.240.000.000	100	1.240.000.000
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	laporan	1			1	250.000.000	1	250.000.000
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		laporan	1			1	250.000.000	1	250.000.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							7.234.000		7.234.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung							14.751.000		14.751.000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia							4.500.000		4.500.000
		Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan							6.750.000		6.750.000
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota							180.840.000		180.840.000
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota							29.925.000		29.925.000
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan							6.000.000		6.000.000

		Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	organisasi	1	1	990.000.000	1	990.000.000	1	990.000.000
		1. Hibah Kwardcab Pramuka Kota Bogor		organisasi	1	1	990.000.000	1	990.000.000	1	990.000.000
TOTAL		TOTAL					106.027.966.591		174.450.997.316		185.713.503.448

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BOGOR

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada target Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor 2025-2026, merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Pembangunan Daerah Kota Bogor. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran RPD Kota Bogor 2025-2026 untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Bogor 2025-2026.

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Dinas, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode yang mengacu pada RPD Kota Bogor 2025-2026 dapat dicapai. Indikator kinerja Perangkat Daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja Perangkat Daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja daerah ini merupakan target Perangkat Daerah yang harus dicapai yang merupakan target selama dua tahun dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor tahun 2025–2026. Target tersebut ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya.

Indikator kinerja kunci Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel (T-C.28)
INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BOGOR

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada 2023	2025	2026
				Target	Target
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	Persen	20	30	35
2	Persentase Wirausaha Muda	Persen	11,7	12,8	12,90
3	Persentase APMO (Angka Partisipasi Masyarakat BerolahRaga)	Persen	44,9	50	51
4	Cakupan Pembinaan Olah Raga	Persen	29,62	33,33%	88,88%
5	Jumlah Atlet/Perolehan Medali Tingkat Provinsi	Medali	74	0	68
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,031	3,312	3,335
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	21,17	25	27
8	Peningkatan prestasi olahraga (Kejuaran Nasional dan Internasional)	Medali	9	15	10

8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program untuk penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih jelasnya dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut;

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BOGOR

Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025	Tahun 2026
					Target	Target
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		1. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	nilai indeks	81,5	83,20	83,30
		2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	NA	91%	92%
		3. Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	%	NA	95%	95%
		4. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 70)	inovasi	NA	≥ 1 Inovasi/tahun/PD	≥ 1 Inovasi/tahun/PD
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	point	88,13	88,75	89,25
Meningkatnya pembudayaan Olah raga dan peningkatan kapasitas serta daya saing olahraga		1. Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO)	%	57,3	59	60
		2. Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi	%	NA	10	50
Meningkatnya kapasitas dan daya saing pemuda		1. Persentase peningkatan wirausaha muda baru	%	NA	1,8	2,1
		2. Persentase Pemuda yang berprestasi di Kota Bogor	%	NA	0,0002	0,0003

BAB VIII**PENUTUP**

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Bogor serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 2 (dua) tahun kedepan dengan berisikan kebijakan menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak pada 2024. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor tahun 2025-2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

